



LAPORAN

SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) KOTA MALANG

TAHUN 2022



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA MALANG - PROVINSI JAWA TIMUR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kerawanan pangan dan gizi merupakan bagian akhir dari proses perubahan situasi pangan dan gizi. Rawan pangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu dalam suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan konsumsi pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kecukupan/kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat. Sedangkan, rawan gizi merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana banyak penduduk mengalami kekurangan gizi.

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan instrumen/alat deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah dan memberikan informasi alternative tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan. Untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya suatu masalah umumnya dikenal dengan istilah Early Warning System (EWS) atau Timely Warning and Intervention System (TWIS), yang selanjutnya di Indonesia diadopsi dan diadaptasi menjadi Sistem Isyarat Dini dan Intervensi (SIDI). Salah satu implementasi SIDI di Indonesia dalam bidang pangan dan gizi dilaksanakan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Analisis data dan informasi secara berkesinambungan tentang Situasi Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan di Kota Malang – Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, melalui analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) pada aspek ketersediaan pangan menunjukkan Indeks Ketersediaan Pangan (IKP) dalam kategori waspada. Namun demikian, berdasarkan wilayah kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru dalam kategori aman. Terjadi peningkatan dibandingkan dengan analisis SKPG pada aspek ketersediaan pangan tahun 2021, dimana semua kecamatan di Kota Malang dalam kategori waspada. Aspek akses pangan menunjukkan Indeks Akses Pangan (IAP) dalam kategori aman. Namun demikian, tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan masalah gizi sebagai akibat kuantitas dan kualitas berupa keragaman konsumsi pangan yang tidak memadai atau tidak memenuhi standar kecukupan konsumsi yang dianjurkan dan aspek pemanfaatan pangan Kota Malang Tahun 2022 dalam keadaan rentan. Aspek pemanfaatan

pangan menunjukkan hasil analisis SKPG Kota Malang Tahun 2022 pada skor komposit aspek pemanfaatan pangan dengan Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP) dalam keadaan rentan. Terjadi penurunan dibandingkan dengan hasil analisis SKPG Kota Malang Tahun 2021 yang menunjukkan bahwa peta situasi pangan dan gizi berwarna hijau atau dalam situasi aman.

Tantangan dalam aspek pemanfaatan pangan di Kota Malang Tahun 2022 adalah ketersediaan pangan sebagian besar masih belum memenuhi kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan sesuai standar rekomendasi WNPX XI Tahun 2018, yaitu sebesar 2.193 Kalori/kapita/hari, dimana ketersediaan pangan karbohidrat masih mendominasi sebagai sumber energi, konsumsi protein, sayuran dan buah-buahan masih belum mencukupi, serta ketersediaan kacang-kacangan sebagai pangan sumber protein nabati yang ditunjukkan dengan skor PPH sebesar 37 (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2022).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kota Malang – Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan SKPG Tahunan dalam rangkaantisipasi terjadinya rawan/rentan pangan dan gizi di Kota Malang – Provinsi Jawa timur. Melalui kegiatan ini, dapat diketahui kecamatan yang berpotensi rawan/rentan pangan dan gizi pada tahun 2022. Laporan ini menyajikan situasi pangan dan gizi tahun 2022 dan merupakan peringatan dini bagi kondisi kerawanan pangan dan gizi transien pada aspek ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Laporan SKPG ini diharapkan dapat menjadi acuan rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan intervensi bagi penanganan kerawanan pangan dan gizi. Laporan SKPG dibuat berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, Dinas Industri dan Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan format yang telah disusun, dikompilasi, ditabulasi dan dianalisis.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu pikiran, tenaga dan waktu untuk mendapatkan semua data dan informasi yang berkaitan dengan situasi pangan dan gizi masyarakat Kota Malang – Provinsi Jawa Timur terutama kepada Tim SKPG atas kerjasama dan komitmen serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Besar harapan kami, semoga Laporan SKPG ini dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai situasi pangan dan gizi di Kota Malang pada khususnya serta Provinsi Jawa Timur pada umumnya dalam rangka mengetahui situasi pangan dan gizi.

Malang, Desember 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Sasaran Kegiatan SKPG	3
D. Indikator Keberhasilan	3
E. Hasil yang Diharapkan	3
BAB II GAMBARAN UMUM SITUASI PANGAN DAN GIZI	4
A. Ketersediaan Pangan	4
1. Produksi (Luas Tanam, Luas Panen, dan Luas Puso)	6
2. Kecukupan Ketersediaan Energi (Kalori/Kapita/Hari)	9
3. Cadangan Pangan	13
4. Jumlah Penduduk	14
B. Akses Pangan	16
C. Pemanfaatan Pangan	19
BAB III METODE PENYUSUNAN SKPG TAHUNAN	23
A. Pengertian dan Ruang Lingkup SKPG	23
B. Organisasi Pelaksana SKPG	23
C. Mekanisme Kerja SKPG	24
1. Pengumpulan Data	24
2. Indikator SKPG	24
3. Pengolahan dan Analisis Data	25
BAB IV HASIL PELAKSANAAN SKPG	30
A. Analisis Indikator SKPG	30
1. Aspek Ketersediaan Pangan	30
2. Aspek Akses Pangan	35
3. Aspek Pemanfaatan Pangan	37
B. Peta Situasi Pangan dan Gizi	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Produksi Tanaman Pangan (dalam Satuan Ton) berdasarkan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2017 – 2021	7
2.	Produksi Pangan Hewani (dalam Satuan Kg) di Kota Malang Tahun 2017 – 2021	8
3.	Ketersediaan Energi (Kalori/Kapita/Hari) Kota Malang Tahun 2018 – 2020	10
4.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan Kota Malang Tahun 2018 – 2020	11
5.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2017 – 2021	16
6.	Perkembangan Harga Pangan Komoditas Utama dan Strategis di Kota Malang Tahun 2021	18
7.	Indikator Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Malang – Provinsi Jawa Timur	24
8.	Analisis Data pada Aspek Ketersediaan Pangan	25
9.	Analisis Data pada Aspek Akses Pangan	25
10.	Analisis Data pada Aspek Pemanfaatan Pangan	26
11.	Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Ketersediaan Pangan	26
12.	Contoh Interpretasi Hasil Analisis dan Tindak Lanjut pada Aspek Ketersediaan Pangan	27
13.	Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Akses Pangan untuk Komoditas Tunggal	27
14.	Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Akses Pangan untuk Dua Komoditas	27
15.	Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Akses Pangan untuk Tiga Komoditas	26
16.	Contoh Interpretasi Hasil Analisis dan Tindak Lanjut pada Aspek Akses Pangan	28
17.	Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Pemanfaatan Pangan	28

18.	Contoh Interpretasi Hasil Analisis dan Tindak Lanjut pada Aspek Pemanfaatan Pangan	29
19.	Luas Tanam Komoditas Pangan Rata-rata 5 Tahun Terakhir (2017 – 2021) dan Tahun Berjalan (2022)	31
20.	Luas Puso Komoditas Pangan Rata-rata 5 Tahun Terakhir (2017 – 2021) dan Tahun Berjalan (2022)	31
21.	Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Ketersediaan Pangan Kota Malang Tahun 2022	32
22.	Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Akses Pangan Kota Malang Tahun 2022	36
23.	Jumlah Balita yang Naik Berat Badan (N), Jumlah Balita yang BGM, dan 3) Jumlah Balita yang Tidak Naik Berat Badan dalam 2 Kali Penimbangan Berturut-turut (2T) dibanding dengan Jumlah Balita Ditimbang Terkoreksi (D')	39
24.	Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Pemanfaatan Pangan Kota Malang Tahun 2022	39

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Peta SKPG Aspek Ketersediaan Pangan Kota Malang Tahun 2021	5
2.	Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari) Kota Malang Tahun 2018 – 2020	12
3.	Peta SKPG Aspek Akses Pangan Kota Malang Tahun 2021	18
4.	Pencapaian Penimbangan Balita (D/S) Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan Target RPJMN Tahun 2020 – 2021	20
5.	Peta SKPG Aspek Pemanfaatan Pangan Kota Malang Tahun 2021	21
6.	Prevalensi (%) Stunted, Wasted, dan Underweight Kota Malang Tahun 2019 – 2021 serta Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional menurut SSGI Tahun 2021	22
7.	Angka Konsumsi Energi/AKE (Kalori/Kapita/Hari)	33
8.	Angka Konsumsi Protein/AKP (Gram/Kapita/Hari)	33
9.	Standar Kecukupan dan Ketersediaan Energi (Kalori/Kapita/Hari) Kota Malang Tahun 2017 – 2022	34
10.	Kontribusi masing-masing Kelompok Pangan terhadap Total Energi pada Standar Kecukupan dan Ketersediaan Energi (Kalori/Kapita/Hari) Kota Malang Tahun 2017 – 2022	35
11.	Prevalensi (%) Stunted, Wasted, dan Underweight Kota Malang Tahun 2019 – 2021 serta Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional menurut SSGI Tahun 2021	37
12.	Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Nasional menurut AKE 2.100 Kalori/Kapita/Hari Tahun 2018 – 2020	38
13.	Peta SKPG Aspek Ketersediaan Pangan Kota Malang Tahun 2022	41
14.	Peta SKPG Aspek Akses Pangan Kota Malang Tahun 2022	42
15.	Pangsa Pengeluaran Makanan (%) dan Pengeluaran Non Makanan (%) Kota Malang Tahun 2017 – 2021	43
16.	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan) menurut Wilayah Perkotaan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	44
17.	Peta SKPG Aspek Pemanfaatan Pangan Kota Malang Tahun 2022	46

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Peta Wilayah Kota Malang	53
1.a.	Form A.1.1. Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan	54
1.b.	Form A.1.2. Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan	54
1.c.	Form A.1.3. Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan	54
2.	Form A.2. Akses Pangan Bulanan	55
3.	Form A.3. Aspek Pemanfaatan Pangan	58
8.	Form B.3. Aspek Pemanfaatan Pangan	59
9.	Form B.4. Aspek Pemanfaatan Pangan	60

DAFTAR SINGKATAN

BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BPS	:	Badan Pusat Statistik
IKA	:	Indeks Akses Pangan
IKP	:	Indeks Ketersediaan Pangan
IPP	:	Indeks Pemanfaatan Pangan
NBM	:	Neraca Bahan Makanan
PPH	:	Pola Pangan Harapan
SIDI	:	Sistem Isyarat Dini dan Intervensi
SKPG	:	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
WNPG	:	Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman agro ekosistem, sosial budaya, pangan dan kerentanan terhadap bencana alam yang cukup tinggi. Berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Malang – Provinsi Jawa Timur memiliki potensi mengalami kerawanan pangan kronis maupun transien. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya rentan rawan pangan sangat diperlukan untuk mencegah dampak yang berakibat terjadinya rawan pangan dan gizi. Badan Pusat Statistik Kota Malang Tahun 2022 melaporkan bahwa ditemukan jumlah kelurahan berdasarkan kerawanan pangan dalam kategori rawan (*vulnerable*) dan agak rawan (*rather vulnerable*) sebesar 12 kelurahan (21,1%) dari 57 kelurahan pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,3%. Peningkatan kelurahan rawan pangan ini terjadi karena situasi dalam masa Pandemi Covid-19, dimana menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian di semua lini usaha, termasuk sektor pertanian. Salah satu dampak yang harus diantisipasi terkait dampak Pandemi Covid-19 adalah ketersediaan pangan dan akses pangan. Demikian juga, dilaporkan bahwa balita gizi buruk sebesar 75 kasus gizi buruk.

Kota Malang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang dan sisi selatan Pulau Jawa, merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, dan kota terbesar ke-12 di Indonesia. Kota Malang didirikan pada masa Pemerintahan Belanda pada Tanggal 1 April 1914, dimana E.K Broeveldt sebagai Walikota pertama. Kota Malang terletak di dataran tinggi seluas 110,06 Km² yang merupakan enklave Kabupaten Malang. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya.

Kota Malang, berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso di sebelah utara; Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang di sebelah timur; Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji di sebelah selatan; dan Kecamatan Wagir serta Kecamatan Dau – Kabupaten Malang di sebelah barat, sebagaimana disajikan pada Lampiran 1. Bagian selatan Kota Malang merupakan dataran tinggi yang cukup luas, sehingga sesuai untuk industri; bagian utara merupakan dataran tinggi yang subur sesuai untuk pertanian; bagian timur merupakan dataran tinggi dengan kondisi kurang subur; dan bagian barat merupakan dataran tinggi yang sangat luas yang menjadi daerah pendidikan.

Kota Malang dilalui oleh salah satu sungai terpanjang di Indonesia serta terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Sungai Bengawan Solo, yaitu Sungai Brantas dengan mata air

terletak di lereng Gunung Arjuno sebelah barat laut kota. Sungai kedua terpanjang adalah Sungai Metro yang melalui Kota Malang di Kelurahan Karangbesuki – Kecamatan Sukun. Kota Malang terletak di dataran tinggi pada ketinggian 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Titik tertinggi berada di Citra Garden City Kota Malang sebuah kota mandiri, sedangkan wilayah terendah berada di Kawasan Dieng. Kota Malang dikelilingi beberapa gunung dan pegunungan, sebelah utara Gunung Arjuno; sebelah timur Gunung Semeru dan Gunung Bromo; serta sebelah barat Gunung Kawi dan Gunung Panderman.

Kota Malang adalah kota besar di Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu tujuan wisata karena potensi alam dan iklimnya. Kota Malang memiliki 16 puskesmas dan 33 puskesmas pembantu yang terletak di daerah pegunungan dan di tengah-tengah Malang Raya, menjadikan Kota Malang sebagai salah satu tujuan wisata wilayah Malang Raya. Pembangunan kesehatan di Kota Malang hanya akan dapat dicapai jika diiringi dengan kemauan, kesadaran, dan kemampuan semua potensi yang ada di Kota Malang untuk mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Sehat. Di sisi lain, Kota Malang juga menghadapi permasalahan gizi kurang, gizi lebih, dan defisiensi zat gizi mikro yang dikenal dengan Triple Burden of Malnutrition yaitu tiga beban gizi salah yang merupakan suatu kondisi yang mengacu pada kekurangan, kelebihan, dan ketidakseimbangan asupan gizi. Permasalahan gizi timbul dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah asupan energi dan zat gizi yang tidak sesuai kebutuhan.

Pemenuhan asupan energi dan zat gizi yang sesuai dengan setiap individu tidak terlepas dari pemenuhan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang harus terpenuhi dalam jumlah yang cukup, aman, beragam, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama. Kondisi pangan yang tidak selalu tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat karena dipengaruhi faktor ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk dapat memastikan kondisi pangan selalu tersedia dan dapat diakses oleh setiap individu dalam pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi serta tercapainya status gizi masyarakat yang optimal. Selanjutnya, untuk dapat mengetahui kondisi pangan dan gizi pada suatu daerah dapat dilakukan melalui hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan mengelola informasi tentang situasi pangan dan gizi yang dilakukan secara terus menerus. Hasil analisis SKPG akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program, serta kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi sehingga tercapai kondisi ketahanan pangan untuk semua kelompok masyarakat di Indonesia (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, 2019).

Penanganan kerawanan pangan, salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi situasi pangan dan gizi secara dini melalui analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. SKPG dilaksanakan melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan analisis yang mendalam melalui analisis manual maupun berbasis web.

B. Tujuan

1. Menganalisis data dan informasi secara berkesinambungan tentang Situasi Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan di Kota Malang – Provinsi Jawa Timur.
2. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi di Kota Malang – Provinsi Jawa Timur.

C. Sasaran Kegiatan SKPG

Pemetaan Situasi Pangan dan Gizi di Kota Malang – Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

D. Indikator Keberhasilan

1. Tersedia analisis situasi pangan dan gizi tahunan.
2. Tersedia analisis hasil investigasi kecamatan yang diindikasikan rawan pangan.
3. Tersusun rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan intervensi penanganan kerawanan pangan dan gizi.
4. Tersedia laporan dan rekomendasi kebijakan dan perencanaan program yang berkaitan dengan pangan dan gizi.

E. Hasil yang Diharapkan

Dokumen berisi tentang situasi pangan dan gizi yang dituangkan dalam peta rawan/rentan pangan tingkat kecamatan di Kota Malang – Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan didukung dengan data kuantitatif dan kualitatif.

BAB II

GAMBARAN SITUASI PANGAN DAN GIZI

A. Ketersediaan Pangan

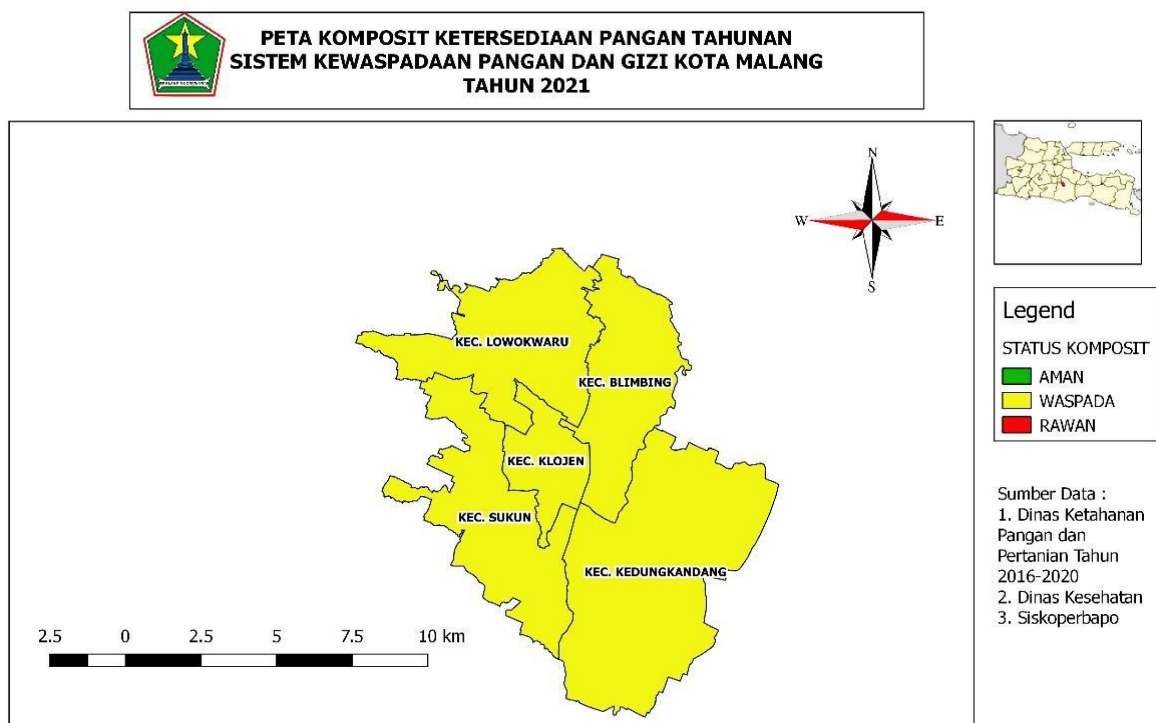
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercemrin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup merupakan aspek penting untuk membentuk ketahanan pangan yang baik bagi suatu rumah tangga. Ketersediaan pangan dapat diperoleh dari produksi sendiri, pasokan pangan dari luar (impor), memiliki cadangan pangan, dan adanya bantuan pangan (Andriani dan Wirjatmadi, 2012).

Kota Malang merupakan agroekologi perkotaan dengan jumlah lahan pertanian yang terus menurun setiap tahun. Oleh karena itu, pembangunan di Kota Malang tidak difokuskan kepada bidang pertanian namun lebih ditujukan pada bidang non pertanian, sehingga mengakibatkan hasil produksi pertanian yang diperoleh sedikit. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sasaran dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Malang Tahun 2020 – 2024 terkait dengan ketersediaan pangan (food availability) adalah:

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan yang beranekaragam yang tercermin dari neraca bahan makanan yang ideal dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan;
- 2) Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, seimbang, dan aman dengan indikator skor PPH konsumsi;
- 3) Terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi keluarga yang tercermin dari kecukupan konsumsi energi dan protein;
- 4) Meningkatnya produksi pertanian meliputi hasil tanaman pangan, ternak, dan ikan dengan memanfaatkan lahan seoptimal mungkin dan mencegah alih fungsi lahan;
- 5) Meningkatnya ketersediaan pangan hewani dengan harga yang stabil dan terjangkau sehingga bisa diakses masyarakat;
- 6) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dari menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, serta kasus balita gizi buruk;
- 7) Meningkatnya perilaku sehat masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan;

- 8) Stabil dan terkendalinya harga bahan pangan pokok dan penting;
- 9) Adanya jaring pengaman sosial pangan;
- 10) Kelembagaan pangan yang kuat yang berperan dalam penyediaan pangan dan mengatasi kerawanan pangan.

Hasil analisis indikator SKPG pada aspek ketersediaan pangan Kota Malang Tahun 2021, menunjukkan bahwa peta situasi pangan dan gizi berwarna kuning atau dalam situasi waspada, sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari aspek ketersediaan pangan, Kota Malang terindikasi rawan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang harus segera melakukan investigasi apakah permasalahan yang timbul pada aspek ketersediaan pangan pada tahun 2021 telah sampai pada tahap membutuhkan upaya penanganan intervensi. Jika Ya, maka harus segera menetapkan jenis intervensi yang tepat. Namun jika Tidak, maka monitoring dan evaluasi situasi pangan dan gizi secara berkala dan berkelanjutan untuk segera ditindak lanjuti.



Gambar 1. Peta SKPG Aspek Ketersediaan Pangan Kota Malang Tahun 2021

Gambar 1 menunjukkan bahwa kondisi waspada pada aspek ketersediaan pangan tersebut disebabkan karena kurangnya luas tanam komoditas pangan di Kota Malang untuk komoditas utama dan strategis, yaitu padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Hal ini disebabkan karena secara geografis sebagian besar Kota Malang merupakan wilayah dengan penggunaan lahan bukan pertanian (Non Agricultural Land). Namun demikian, jika dilihat dari aspek

produksi pangan utama dan strategis dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

1. Produksi (Luas Tanam, Luas Panen, dan Luas Puso)

Ketersediaan pangan di Kota Malang berasal dari produksi maupun impor (mendatangkan bahan pangan dari kota/kabupaten lain). Sebagian besar ketersediaan pangan untuk sebagian kelompok pangan berasal dari impor kota/kabupaten lain. Kota Malang adalah daerah perkotaan dan terbatasnya lahan untuk pertanian. Impor (mendatangkan beberapa komoditas pangan Kota Malang berasal dari kota/kabupaten sekitar), seperti Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Batu. Tingginya impor mengakibatkan ketergantungan penyediaan pangan dari kota/kabupaten sekitar, dampaknya pemerintah dan pedagang di pasar harus menyiapkan anggaran yang tinggi untuk mendatangkan pangan.

Sebagian besar komoditas pangan yang tersedia di Kota Malang digunakan untuk bahan makanan atau konsumsi penduduk. Beberapa komoditas yang digunakan untuk bahan baku industri makanan antara lain, ubi kayu, kacang tanah, dan kelapa. Komoditas kelapa misalnya dalam industri makanan diolah menjadi santan yang akan digunakan penduduk dalam proses pengolahan makanan, pada akhirnya digunakan untuk konsumsi penduduk. Keadaan ini perlu dicermati apabila seluruh ketersediaan ini dikonsumsi oleh penduduk, maka akan timbul masalah gizi lebih (kegemukan) yang berdampak munculnya penyakit degeneratif.

Penggunaan bahan makanan selain untuk dikonsumsi penduduk, juga digunakan untuk pakan, bibit, industri non makanan, dan tercecer. Beberapa komoditas yang digunakan untuk pembuatan pakan adalah padi, beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kedelai, kelapa, dan susu sapi. Komoditas pangan tersebut sebagian digunakan untuk pakan ternak, mengingat masih banyaknya peternakan sapi, ikan, dan unggas yang didominasi di Kecamatan Kedungkandang (Dita Atasa dan Tri Wahyu Nugroho, 2021). Selain itu, penggunaan untuk bibit ditujukan untuk menjaga keberlangsungan komoditas pangan. Komoditas pangan yang digunakan untuk bibit antara lain kelompok sayur-sayuran, telur ayam buras, dan telur ayam itik, sedangkan untuk kelompok pangan lain yang diproduksi akan tetapi tidak ada sumbangan untuk bibit, diduga bibit berasal dari impor (luar Kota Malang). Penggunaan lainnya untuk industri non makanan hanya komoditas ubi kayu. Jumlah pangan yang tercecer menggambarkan jumlah pangan yang tidak dapat digunakan, disebabkan karena hilang, busuk, ataupun rusak selama proses distribusi.

Ketersediaan pangan di Kota Malang diperoleh dari produksi tanaman pangan, meliputi sereal, kacang-kacangan, minyak nabati, sayur-sayuran, buah-buahan, rempah, gula, dan produksi pangan hewani selama 5 (lima) tahun terakhir masing-masing disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Produksi Tanaman Pangan (dalam Satuan Ton) berdasarkan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2017 – 2021

Tahun	Kecamatan					Kota Malang
	Kedungkandang	Sukun	Klojen	Blimbing	Lowokwaru	
Padi						
2017	4.065	3.671	-	1.689	3.754	13.179
2018	4.139	4.658	-	1.460	4.008	14.265
2019	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2021	6.365	2.895	-	1.355	5.007	15.380
Ubi Kayu						
2017	2.645	165	-	-	93	2.903
2018	2.213	118	-	-	121	2.452
2019	1.849	234	-	-	93	2.176
2020	537	53	-	-	154	744
2021	1.760	739	-	-	102	2.601
Ubi Jalar						
2017	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
Jagung						
2017	691	44	-	0	33	768
2018	566	45	-	4	63	678
2019	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2021	988	39	-	-	19	693
Kacang Tanah						
2017	-	36	-	-	-	36
2018	4	18	-	-	-	22
2019	-	11	-	-	-	11
2020	-	-	-	-	-	-
2021	7	14	-	-	-	21

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian – Kota Malang, 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa produksi tanaman pangan yang meliputi padi, ubi kayu, jagung, dan kacang tanah cenderung menurun. Penurunan ini disebabkan karena luas tanam yang berkurang akibat alih fungsi lahan pertanian di Kota Malang. Kecamatan Klojen merupakan wilayah geografis perkotaan, sehingga tidak ada produksi tanaman pangan karena

secara geografis, Kecamatan Klojen – Kota Malang merupakan wilayah dengan penggunaan lahan bukan pertanian (Non Agricultural Land) dengan luas 883 Ha.

Tabel 2 menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu Tahun 2017 – 2021 produksi pangan hewani cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan hewani telah memenuhi kontribusi energi sebesar 15% dari total energi per kapita per hari pada tingkat kecukupan ketersediaan energi, bahkan pada tahun 2020 memenuhi hingga 17% sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Demikian juga dengan ketersediaan protein pada tahun 2021 sebesar 68 gram/kapita/hari telah memenuhi 108% kecukupan ketersediaan protein, yaitu 63 gram/kapita/hari.

Tabel 2. Produksi Pangan Hewani (dalam Satuan Kg) di Kota Malang Tahun 2017 – 2021

Komoditas Pangan Hewani	Produksi Pangan Hewani (dalam Satuan Kg) pada Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Daging					
Sapi Potong	3.106.944	3.388.200	3.686.280	3.419.780	4.063.080
Sapi Perah	163.560	59.400	77.250	52.250	-
Kerbau	-	-	-	-	-
Kambing	403.801	376.890	348.806	242.199	208.450
Domba	9.129	8.568	15.317	4.709	
Babi	500.067	506.034	464.376	463.286	403.080
Kuda	0	0	0	0	
Ayam Buras	476.000	532.000	542.678	501.770	130.010
Ayam Petelur	27.209	45.000	45.882	39.014	41.880
Ayam Pedaging	19.316.700	19.427.850	19.324.882	14.458.690	14.744.150
Itik	25.500	26.500	26.293	20.455	19.970
Entok	2.340	2.600	2.526	2.444	10.350
Kelinci	169	202	182	112	-
Burung Dara	170	150	143	102	-
Burung Puyuh	40	42	53	49	-
Susu					
Sapi Perah	237.467	256.177	355.273	346.615	346.180
Telur					
Ayam Buras	27.593	27.601	27.600	24.428	28.130
Ayam Petelur	1.970.777	1.955.658	2.084.338	2.393.720	2.304.360
Itik	78.931	74.902	62.846	42.726	26.860
Entok	958	918	811	703	840
Burung Puyuh	7.200	10.560	23.010	26.400	22.640

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022.

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa produksi pangan hewani terutama telur yang berasal dari ayam petelur cenderung meningkat hingga tahun 2020. Kondisi ini diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan pangan hewani untuk memenuhi kecukupan konsumsi protein sebesar 57 gram/kapita/hari sesuai rekomendasi WNPG IX Tahun 2018. Konsumsi telur setiap hari sebagai makanan tambahan dapat mengentaskan prevalensi stunting pada anak hingga 47%, prevalensi underweight turun 74%, dan konsumsi makanan manis di kalangan anak juga turun, serta diikuti dengan peningkatan konsumsi telur meningkat secara signifikan (Lanotti, et.al., 2017 dalam Khomsan, A., 2018).

2. Kecukupan Ketersediaan Energi (Kalori/Kapita/Hari)

Tingkat ketersediaan pangan selain dianalisis berdasarkan kecukupan gizi yang dianjurkan baik energi dan protein, juga dianalisis dari segi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi dari Neraca Bahan Makanan (NBM). Tingkat keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan. PPH digunakan sebagai acuan dalam mengetahui kualitas dan ketersediaan pangan di Kota Malang yang digambarkan dari skor PPH dan komposisi kelompok pangan. Skor PPH ketersediaan pangan Kota Malang pada tahun 2018 (77.9), 2019 (69.7) dan 2020 (88.2) ini belum memenuhi target skor PPH Nasional, yaitu 100 (WNPG, 2018).

Ketersediaan pangan yang cukup dan berlimpah menjadi salah satu syarat tercapainya ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat (Rachmat, 2015). Penilaian ketersediaan pangan dalam suatu wilayah dapat diukur melalui tersedianya energi dan protein per kapita per hari. Standar pengukuran ketersediaan pangan berupa energi sebesar 2.400 Kalori/kapita/hari dan protein sebesar 63 g/kapita/hari. Berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang disajikan pada Tabel 3, menunjukkan bahwa ketersediaan energi di Kota Malang setiap tahun mengalami penurunan. Ketersediaan energi di Kota Malang tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 2.667 Kalori/kapita/hari melebihi dari standar kecukupan ketersediaan energi rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 sebesar 2.400 Kalori/kapita/hari, sehingga pada tahun 2018 Kota Malang telah mencapai ketahanan pangan berdasarkan aspek ketersediaan energi. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020, ketersediaan energi masih di bawah standar kecukupan ketersediaan energi, yang berarti belum mencapai ketahanan pangan.

Ketersediaan energi tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 2.195 Kalori/kapita/hari dan 2.174 Kalori/kapita/hari. Penurunan ketersediaan energi di Kota Malang

disebabkan karena penurunan jumlah pangan yang tersedia pada sebagian besar kelompok pangan. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa kelompok pangan yang setiap tahun mengalami penurunan adalah padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, dan kacang-kacangan. Sedangkan kelompok pangan yang setiap tahun mengalami peningkatan ketersediaan energi adalah umbi-umbian, gula, sayur dan buah. Ketersediaan energi di Kota Malang didominasi oleh sumber pangan nabati, yaitu pada tahun 2018 sebesar 2.265 Kalori/kapita/hari, pada tahun 2019 sebesar 2.062 Kalori/kapita/hari, dan pada tahun 2020 sebesar 1.804 Kalori/kap/hari. Sumber pangan nabati berasal dari kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, buah dan sayur. Sumbangan energi dari pangan hewani sebesar 402 Kalori/kapita/hari, 133 Kalori/kapita/hari, dan 370 Kalori/kapita/hari masing-masing pada tahun 2018, 2019, dan 2020 telah memenuhi standar kecukupan ketersediaan rekomendasi WNPG XI Tahun 2018 sebesar 367 Kalori/kapita/hari kecuali pada tahun 2019 belum memenuhi standar kecukupan ketersediaan.

Tabel 3. Ketersediaan Energi (Kalori/Kapita/Hari) Kota Malang Tahun 2018 – 2020

Kelompok Pangan	Kontribusi Energi (%) masing-masing Kelompok Pangan terhadap Total Energi (Kalori/Kapita/Hari)							
	Kecukupan Ketersediaan*)		2018		2019		2020	
	Energi	%	Energi	%	Energi	%	Energi	%
Padi-padian	1200	50	1243	46,6	1237	56,4	749	34,5
Umbi-umbian	120	5	150	5,6	108	4,9	147	6,7
Pangan Hewani	367	15,3	402	15,1	133	6,1	370	17,0
Minyak dan Lemak	240	10	397	14,9	397	18,1	393	18,1
Buah Biji Berminyak	72	3	135	5,1	130	5,9	34	1,6
Kacang-kacangan	120	5	212	8,0	0	0	122	5,6
Gula	161	6,7	87	3,3	76	3,4	225	10,3
Sayuran dan Buah-buahan	120	5	41	1,5	114	5,2	134	6,2
Pangan Nabati	2033	84,7	2265	84,9	2062	93,9	1804	17,0
Pangan Hewani	367	15,3	402	15,1	133	6,1	370	83,0
Total	2400	100,0	2667	100,0	2195	100,0	2174	100,0

Sumber: Atasa, D., dkk., 2022

*) WNPG XI (2018) Standar Kecukupan Ketersediaan Energi

Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan Kota Malang. Tingkat ketersediaan pangan selain dinilai berdasarkan kuantitas kecukupan energi dan protein, penilaian berdasarkan kualitas atau keanekaragaman ketersediaan pangan dianalisis dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Ketersediaan pangan yang beranekaragam akan mendukung

tercapainya konsumsi pangan yang beranekaragam. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup : (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain. PPH merupakan bahan pedoman untuk mengetahui kualitas ketersediaan pangan yang digambarkan berdasarkan hasil nilai PPH dan komposisi pangan. Berdasarkan hasil analisis skor PPH yang disajikan pada Tabel 4, menunjukkan bahwa skor PPH berfluktuasi, terjadi penurunan pada tahun 2019, dan kenaikan pada tahun 2020. Secara keseluruhan, skor PPH pada tahun 2018 – 2020 belum ideal karena skor PPH yang diperoleh kurang dari skor ideal yaitu 100, dimana skor tersebut masing-masing adalah 77,9; 69,7; dan 88,2. Hal ini menunjukkan kualitas ketersediaan pangan berdasarkan komposisi kelompok pangan belum beragam.

Tabel 4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan Kota Malang Tahun 2018 – 2020

Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan Kota Malang			
	Standar Kecukupan Ketersediaan *)	2018	2019	2020
Padi-padian	25	25	25	15,6
Umbi-umbian	2,5	2,5	2,3	2,5
Pangan Hewani	24	24	11,1	24
Minyak dan Lemak	5	5	5	5
Buah Biji Berminyak	1	1	1	0,7
Kacang-kacangan	10	10	0	10
Gula	2,5	1,9	1,6	2,5
Sayuran dan Buah-buahan	30	8,5	23,7	27,9
Total	100	77,9	69,7	88,2

Sumber: Atasa, D., dkk., 2022

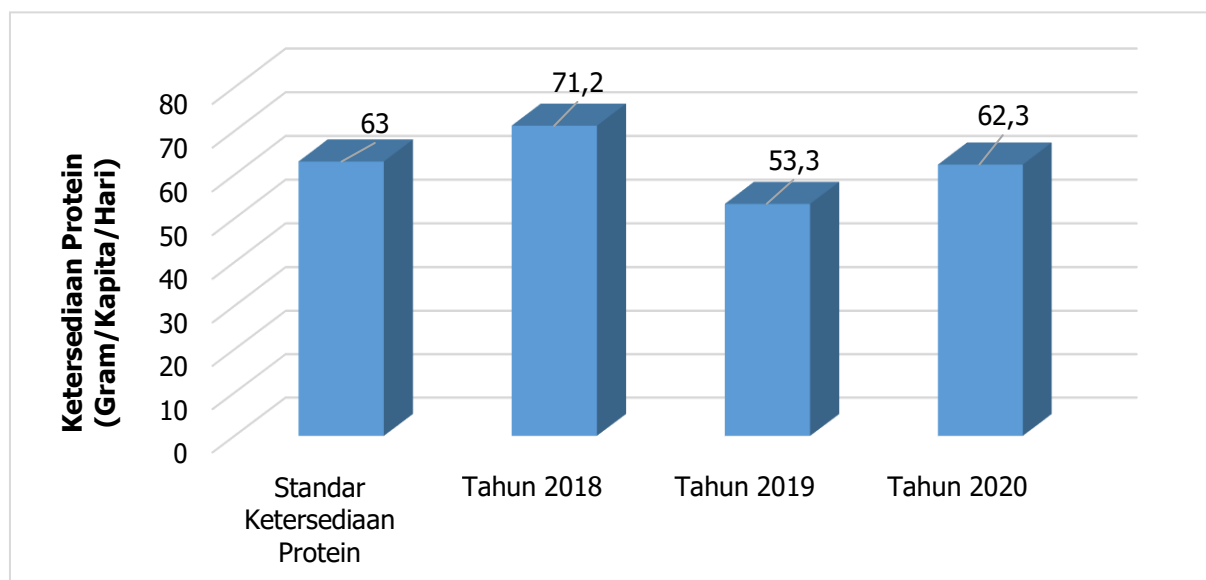
*) WNPG XI (2018) Standar Kecukupan Ketersediaan Energi

Tabel 4, juga menunjukkan bahwa pada tahun 2018 kelompok pangan dengan skor di bawah skor normatif yaitu gula, buah, dan sayuran, pada tahun 2019 meliputi kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, gula, sayuran dan buah. Sedangkan pada tahun 2020 kelompok pangan dengan skor PPH di bawah normatif yaitu buah dan biji berminyak, padi-padian, buah-buahan dan sayuran. Kelompok pangan dengan skor PPH belum memenuhi skor PPH normatif menunjukkan bahwa jumlah pangan yang tersedia untuk bahan pangan

maupun industri pangan yang pada akhirnya dikonsumsi oleh penduduk Kota Malang secara kuantitas dan kualitas kelompok pangan tersebut belum terpenuhi. Sehingga, diperlukan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut meliputi peningkatan produksi maupun menambah jumlah impor baik impor luar kota/kabupaten.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencerminkan suatu mutu gizi ketersediaan pangan dan tingkat keragaman atau diversifikasi ketersediaan pangan. Terdapat kriteria sesuai dengan skor PPH, yaitu Skor PPH < 78: Segitiga Perunggu, Skor PPH 78 – 88: Segitiga Perak, dan Skor PPH > 88: Segitiga Emas (Suyatno, 2009). Semakin tinggi skor PPH, ketersediaan pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor ketersediaan pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan.

Ketersediaan protein sebagaimana disajikan pada Gambar 2, menunjukkan bahwa ketersediaan protein Kota Malang berfluktuatif. Ketersediaan protein tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 71,2 g/kapita/hari, telah memenuhi standar kecukupan ketersediaan protein rekomendasi WNPNG XI Tahun 2018 sebesar 63 g/kapita/hari, sehingga pada tahun 2018 Kota Malang dapat dikategorikan tahan pangan berdasarkan ketersediaan protein. Sedangkan, ketersediaan protein pada tahun 2019 sebesar 53,3 g/kapita/hari dan pada tahun 2020 sebesar 62,3 g/kapita/hari, masih di bawah standar kecukupan ketersediaan protein. Dengan demikian, Kota Malang pada tahun 2019 dan 2020 belum tahan pangan berdasarkan kategori ketersediaan protein.



Gambar 2. Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari) Kota Malang Tahun 2018 – 2020

3. Cadangan Pangan

Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan/atau keadaan darurat seperti terjadi peristiwa yang diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, meskipun hal ini dapat diperkirakan. Ketersediaan dan cadangan pangan sudah harus terukur kualitasnya dan diketahui secara pasti sehingga memudahkan untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan masalah pangan (Rachmat, dkk., 2003). Selain itu, beberapa kajian menunjukkan persediaan pangan yang cukup secara nasional terbukti tidak menjamin perwujudan ketahanan pangan dalam tingkat wilayah/regional, rumah tangga, atau individu. Martianto dan Ariani (2004) menunjukkan bahwa jumlah proporsi rumah tangga yang defisit energi di setiap provinsi makin tinggi.

Ketersediaan pangan yang memadai mengandung arti bahwa secara rata-rata, pangan tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi. Cadangan pangan yang ada di rumah tangga baik individu maupun kolektif dinilai penting karena terkait langsung dengan masalah kerawanan pangan masyarakat dan rumah tangga. Sementara, cadangan pangan yang berada di pedagang dan koperasi lebih bersifat sebagai komoditas atau barang dagang sehingga mobilitas tinggi. Fungsi cadangan pangan yang dikuasai oleh rumah tangga baik secara individu maupun kolektif adalah: (1) mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik, dan (2) mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, anomali iklim, dan banjir (Rachman, 2005 dalam Dillah, ZU., 2017).

Pengelolaan cadangan pangan harus dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Masyarakat sesuai amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/1/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dimana Pasal 1 menjelaskan beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya. Cadangan Beras Nasional (CBN) adalah persediaan beras di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia, dan untuk menghadapi masalah kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi (CBPP) adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perhitungan jumlah CBPP dan CBPK didasarkan pada kriteria: (a) jumlah penduduk; (b) konsumsi beras per kapita per tahun; dan (c) proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Rumus penghitungan penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah, sebagai berikut:

- 1) Cadangan Beras Total Provinsi "X" = $0,5\% \times \text{Jumlah Penduduk Provinsi} \times \text{Konsumsi Beras per Kapita per Tahun di Provinsi}$ dibagi 1.000
- 2) Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) = $20\% \times \text{Cadangan Beras Total Provinsi "X"}$.
- 3) Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) "Y" = $80\% \times \text{Cadangan Beras Total Provinsi "X"} \times \text{Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota "Y" terhadap Jumlah Penduduk Provinsi "X"}$.

Keterangan dan Asumsi Perhitungan CBPP dan CBPK:

- 1) Cadangan Beras Nasional (CBN) sebesar 20% dari total kebutuhan beras nasional. Cadangan tersebut terbagi atas 11,5% di masyarakat, 8% dikuasai oleh Pemerintah Pusat dan 0,5% di Pemerintah Daerah.
- 2) Pemerintah Daerah memiliki kontribusi dalam penyediaan cadangan pangan nasional sebesar 0,5%. Angka tersebut menjadi proporsi utama dalam perhitungan CBPP.
- 3) Cadangan Beras Pemerintah Provinsi "X" adalah CBPP ditambah dengan CBPK di Provinsi "X".
- 4) Cadangan Beras Pemerintah Provinsi "X" diasumsikan memiliki proporsi 20% dari total cadangan beras total Provinsi "X".
- 5) CBPK "Y" diasumsikan memiliki proporsi 80% dari cadangan beras total Provinsi "X" yang dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk Kabupaten/Kota "Y" terhadap jumlah penduduk Provinsi "X".

4. Jumlah Penduduk

Pangan penting bagi hidup dan penghidupan manusia. Manusia harus makan dalam ukuran dan komposisi yang tepat. Berbagagai usaha telah dilakukan manusia untuk menjamin ketersediaan bahan pangan. Kenaikan luas panen dan produktivitas selalu diupayakan. Diversifikasi tanaman pangan dan komposisi konsumsi menjadi perhatian pemerintah maupun para ahli pertanian dan gizi. Keterbatasan lahan tanam oleh adanya alih fungsi lahan menjadi hal yang serius sekarang ini. Pertambahan penduduk memerlukan terpenuhi kebutuhan tempat hunian dan fasilitas publik yang lain. Adanya perubahan iklim mengganggu ketersediaan air untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, penduduk masih tetap mengalami pertambahan dan pertumbuhan. Di beberapa negara maju pertambahan penduduk sudah mencapai tingkatan yang rendah, yaitu kurang dari satu persen tiap tahun. Keadaan di negara yang sedang berkembang sebagian besar masih pada posisi sedang sampai tinggi.

Penduduk dengan bahan pangan dua hal yang berbeda sifat perkembangannya. Digambarkan oleh Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) bahwa perkembangan penduduk mengikuti deret ukur, sedang bahan pangan mengikuti deret hitung. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hidup manusia dikuasai hukum alam yang bersifat berlawanan, yaitu (1) kebutuhan pangan dan (2) nafsu seksual. Kebutuhan tersebut masih berlaku hingga sekarang, apa yang digambarkan oleh T.R. Malthus tersebut dalam jangka panjang, penduduk akan merasakan kekurangan bahan pangan. Penduduk akan mengalami kesulitan untuk memperoleh pangan, mengalami kemiskinan, dan lebih lanjut mengalami kelaparan yang mengakibatkan daya tahan tubuh turun, mudah sakit yang menyebabkan kematian.

Penduduk dan bahan pangan merupakan dua hal yang berbeda, tetapi ada kaitan satu sama lain yang bersifat kausal, apabila jumlah penduduk bertambah permintaan bahan pangan juga bertambah. Dalam keadaan normal, keseimbangan keduanya akan terganggu, yang menderita adalah penduduk. Penduduk menjadi sebab terjadi gangguan terhadap keseimbangan ketahanan pangan sekaligus menjadi korban. Sejarah kehidupan manusia menunjukkan bahwa pola pertumbuhan penduduk mula-mula sangat lambat, berangsur-angsur meningkat kemudian kembali lambat sebagaimana yang terjadi sekarang. Penduduk yang ada sekarang ini merupakan hasil proses pertumbuhan penduduk yang disebut model transisi. Transisi penduduk ditandai pertumbuhan rendah pada tahap awal, tinggi pada tahap tengah, dan rendah pada tahap akhir. Keadaan tersebut terkait dengan pola kelahiran dan kematian yang terjadi sepanjang masa (Wardoyo, S., 2010).

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kecamatan di Kota Malang Tahun 2017 – 2021 disajikan pada Tabel 5. Dimana, Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan pada semua kecamatan di Kota Malang pada 5 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2017 – 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan pangan juga harus terus ditingkatkan untuk memenuhi kecukupan konsumsi pangan penduduk hingga terpenuhi kecukupan konsumsi energi dan zat gizi sesuai angka kecukupan energy dan zat gizi yang dianjurkan, yaitu energi 2.100 Kalori/kapita/hari dan protein 57 gram/kapita/hari (WNPG IX, 2018). Namun demikian, pada tahun 2021 telah menunjukkan penurunan di Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru, serta Kota Malang.

Jumlah penduduk Kota Malang Bulan Juni Tahun 2021 sebanyak 844.933 orang. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 – 2021 sebesar 0,13%. Penduduk Kota Malang paling banyak bertempat tinggal di Kecamatan Kedungkandang sebanyak 208.075 orang (24,63%) dan paling sedikit di Kecamatan Klojen sebanyak 94.072 orang (11,13%). Kepadatan penduduk paling tinggi di Kecamatan Klojen yaitu 10.654 jiwa per kilometer persegi. Rasio

jenis kelamin di Kota Malang pada tahun 2021 sebesar 99,02 yang berarti dalam 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Tabel 5. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2017 – 2021

Tahun	Kecamatan					Kota Malang
	Kedungkandang	Sukun	Klojen	Blimbing	Lowokwaru	
Laki-laki						
2017	94.663	95.128	49.338	88.454	95.747	423.330
2018	95.662	96.516	48.833	89.209	96.858	427.078
2019	96.684	97.194	48.571	89.570	97.397	429.416
2020	97.650	97.813	48.277	89.871	97.872	431.483
2021						
Perempuan						
2017	95.611	97.099	54.027	90.507	99.359	436.603
2018	96.654	97.805	53.751	90.895	99.935	439.040
2019	97.657	98.465	53.447	91.235	100.465	441.269
2020	98.648	99.104	53.133	91.555	100.967	443.407
2021						
Total						
2017	190.274	192.227	103.365	178.961	195.106	859.933
2018	192.316	194.321	102.584	180.104	196.793	866.118
2019	194.341	195.659	102.018	180.805	197.862	870.685
2020	196.298	196.298	101.410	181.426	198.839	874.890
2021	208.075	196.487	94.072	182.504	163.795	844.810

Sumber: BPS Kota Malang, 2022.

B. Akses Pangan

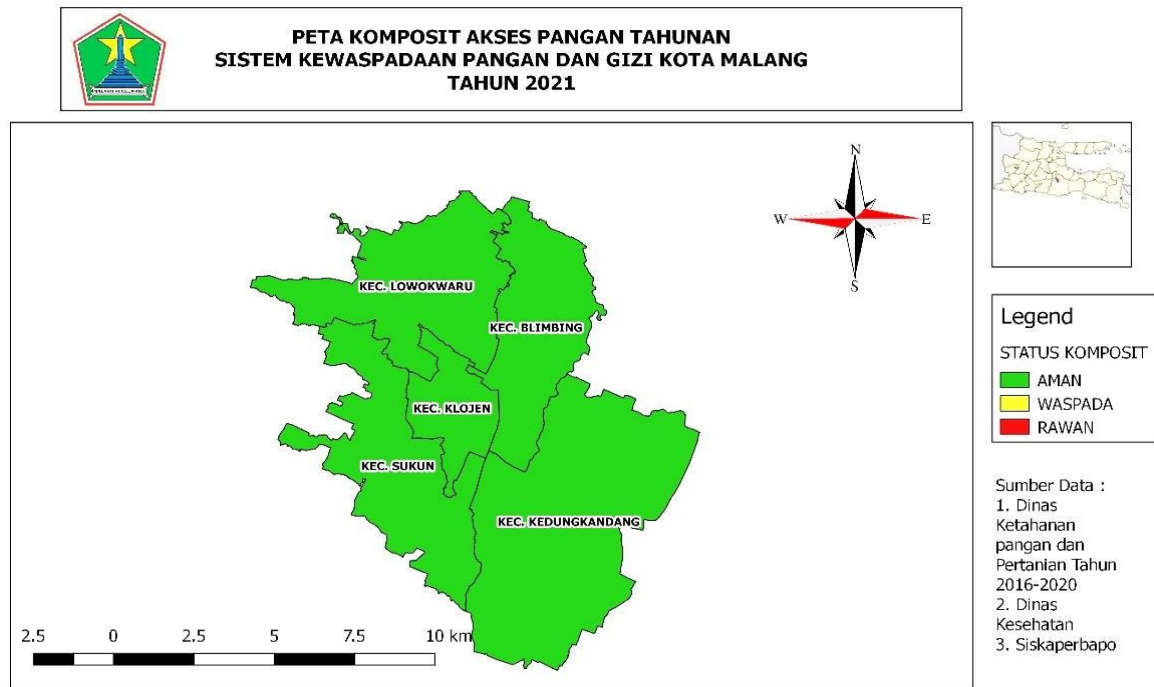
Menjamin keterjangkauan dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk membeli bahan pangan beras. Pemerintah berusaha untuk mengendalikan harga beras melalui penetapan harga gabah kering giling. Apabila terjadi gejolak harga pasar pemerintah mengadakan operasi pasar, dengan cara ini diharapkan harga beras stabil dan terjangkau daya beli masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mampu, pemerintah mengadakan pembagian beras dengan harga tebusan yang murah. Konsumsi bahan pangan terutama makanan pokok beras, masyarakat Indonesia masih tergolong tinggi. Konsumsi beras per kepala pertahun mencapai 139 Kg, lebih tinggi dari negara lain di kawasan Asia Tenggara: Malaysia 90 Kg, Brunai 80 Kg, Thailand 79 Kg. Perlu catatan khusus mengapa negara pengekspor beras (Thailand) konsumsi beras bagi masyarakat hanya setengah dari konsumsi beras di Indonesia. Hal ini dapat dipastikan sudah ada makanan substitusi yang lain sehingga tidak hanya mengkonsumsi nasi sebagai sumber energi.

Masyarakat Indonesia sebagian besar mengkonsumsi beras/nasi sebagai makanan pokok. Frekuensi makan dan komposisi menu memasukkan nasi sebagai unsur yang selalu

ada. Indonesia menggunakan frekuensi makan tiap hari dijadikan kriteria untuk menempatkan status keluarga. Keluarga Sejahtera III dapat dicapai apabila frekuensi makan per hari sebanyak tiga kali dan unsur nasi selalu harus ada. Keadaan ini rupanya menjadi sebab banyaknya konsumsi beras per kapita. Produksi padi sering kali mengalami gagal panen oleh adanya gangguan hama dan penyakit, kekurangan air, banjir, angin, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pertanian Indonesia menganjurkan adanya diversifikasi produksi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan, dan sekaligus diversifikasi konsumsi pangan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan untuk mewujudkan swasembada beras dengan meminimalkan konsumsi beras agar tidak melebihi produksi. Dengan cara ini diharapkan dapat dihindarkan atau dikurangi kerugian yang diderita oleh petani. Apabila terjadi diversifikasi bahan pangan yang dikonsumsi diharapkan dapat menghemat konsumsi beras. Di Indonesia terdapat banyak bahan pangan selain beras seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan kacang-kacangan. Dengan mengubah komposisi konsumsi tiap hari memungkinkan terjadi penghematan beras dan menaikkan posisi tawar produksi palawija, yang selanjutnya akan mengurangi ketergantungan terhadap beras.

Akses pangan juga dapat ditunjukkan dengan rata-rata pengeluaran penduduk Kota Malang pada tahun 2021 sebesar Rp 1.766.013,77 yang terdiri dari Rp 667.894,50 pengeluaran makanan (37,82%) dan Rp 1.098.119,27 pengeluaran bukan makanan (62,18%). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Malang relatif sejahtera atau tidak miskin karena proporsi pengeluaran pangan < 60% dari total pengeluaran. Sebagaimana Hukum Ernest Engel (1857 dalam BPS, 2014) bahwa persentase pengeluaran untuk makan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Oleh karena itu, komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan sebagai indikator untuk kesejahteraan penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Menurut Teori Konsumsi Keynes bahwa ada hubungan antara pendapatan yang diterima saat ini (disposable income) dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Dengan kata lain, pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh penduduk dalam waktu itu juga. Apabila pendapatan meningkat maka konsumsi yang dilakukan juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya (Pujoharso, 2013). Selanjutnya, jika dirinci menurut kelompok pengeluaran, pada kuintil 1 (20% terbawah) pengeluaran rata-rata per bulan sebesar Rp 546.125,57 dan pada kuintil 5 (20% teratas) rata-rata pengeluaran mencapai Rp 4.178.297,97. Sedangkan, untuk kelas menengah (kuintil 3 dan 4) pengeluaran rata-rata per bulan sebesar Rp 1.264.299,82 dan Rp 1.986.977,49.

Hasil analisis SKPG Kota Malang Tahun 2021 menunjukkan bahwa Hasil analisis indikator SKPG pada aspek akses pangan Kota Malang Tahun 2021, menunjukkan bahwa peta situasi pangan dan gizi berwarna hijau atau dalam situasi aman, sebagaimana disajikan pada Gambar 3. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari aspek akses pangan, Kota Malang terindikasi tahan pangan. Hasil analisis SKPG Kota Malang Tahun 2021 ini sejalan dengan analisis Hukum Ernest Engel (1857 dalam BPS, 2014) bahwa persentase pengeluaran untuk makan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan maupun Teori Konsumsi Keynes.



Gambar 3. Peta SKPG Aspek Akses Pangan Kota Malang Tahun 2021

Perkembangan harga pangan komoditas utama dan strategis di Kota Malang pada Tahun 2021 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perkembangan Harga Pangan Komoditas Utama dan Strategis di Kota Malang Tahun 2021

Kecamatan	Rata-rata Harga Komoditas 3 Bulan Terakhir di Tingkat Konsumen							
	Beras Kualitas Sedang	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Gula	Minyak Goreng	Daging Ayam	Telur
	(Rp/Kg)	(Rp/Kg)	(Rp/Kg)	(Rp/Kg)	(Rp/Kg)	(Rp/Liter)	(Rp/Kg)	(Rp/Kg)
Kedungkandang	11.167	7.667	4.833	23.667	11.833	13.333	35.000	25.500
Sukun	11.167	7.667	5.333	25.667	12.333	14.167	37.333	25.333
Klojen	11.167	7.667	5.000	24.000	12.000	13.500	35.000	26.167
Blimbing	11.000	7.667	4.667	24.333	11.333	13.333	35.667	25.167
Lowokwaru	11.167	8.167	4.833	24.833	12.167	14.000	35.333	26.667

Sumber: Tim SKPG Kota Malang, 2021

C. Pemanfaatan Pangan

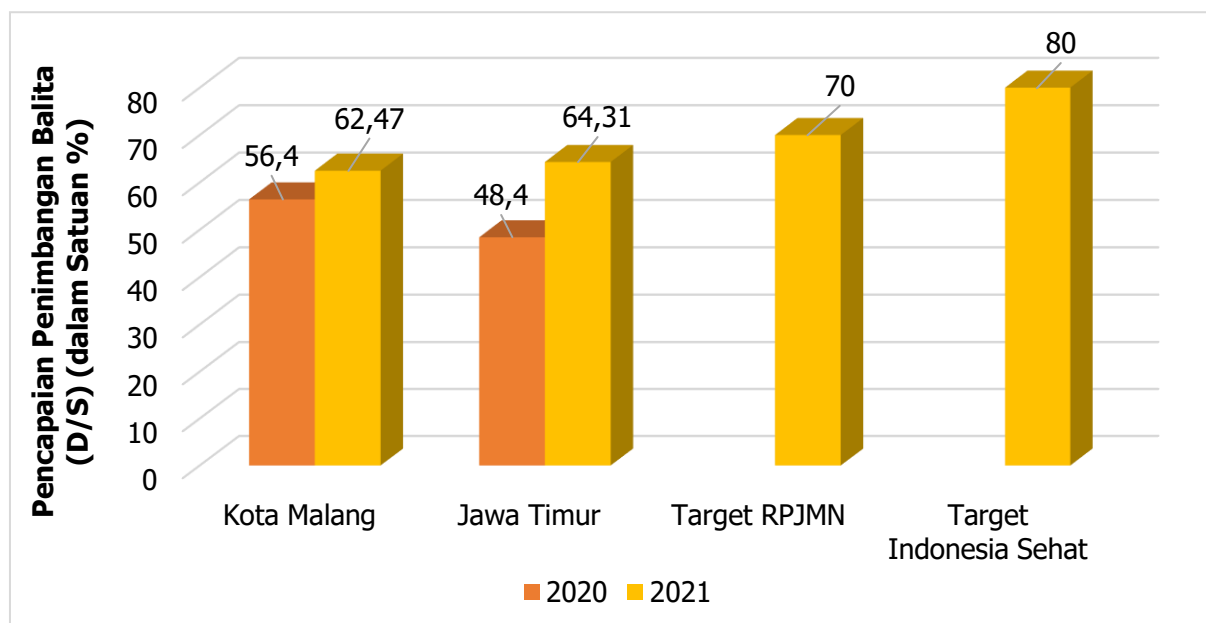
Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan metabolisme zat gizi (konversi zat gizi secara efisien oleh tubuh). Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyimpanan pangan termasuk pengguna air dan bahan bakar selama proses pengolahan. Selain itu, perlu diperhatikan kondisi higienis, budaya atau kebiasaan pemberian makanan terutama untuk individu yang memerlukan jenis pangan khusus, distribusi pangan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dan lain-lain) serta status kesehatan.

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs adalah status gizi balita. Status gizi balita dapat diukur berdasarkan umur, berat badan (BB), dan tinggi badan (TB). Ketiga variabel ini disajikan dalam bentuk tiga indikator antropometri, yaitu: Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). Hasil analisis Bulan Timbang dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, menunjukkan bahwa balita underweight (BB/U) sebesar 9,8% lebih rendah dari target RPJMN sebesar 15%, balita stunting (TB/U) sebesar 12,4% juga lebih rendah dari target RPJMN sebesar 18,4%, sedangkan balita wasting sebesar 8,0% lebih tinggi dari target RPJMN sebesar 7,8%. Sedangkan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 menunjukkan bahwa balita underweight (BB/U) sebesar 17,7% lebih tinggi dari target RPJMN sebesar 15%, balita stunting (TB/U) sebesar 25,7% juga lebih tinggi dari target RPJMN sebesar 18,4%, sedangkan balita wasting sebesar 4,6% lebih rendah dari target RPJMN sebesar 7,8%. Perbedaan ini disebabkan karena sampel pada Bulan Timbang adalah seluruh balita, sedangkan SSGI menggunakan sampel rumah tangga yang memiliki balita yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Demikian juga, pengukuran status gizi dengan metode antropometri pada Bulan Timbang dilaksanakan oleh Kader Posyandu sedangkan SSGI dilaksanakan oleh Nutritionis dengan jenjang pendidikan Diploma 3 Gizi, Sarjana Terapan Gizi – Dietetika, dan Sarjana Gizi.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan program gizi adalah berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang menunjukkan adanya masalah gizi akut di suatu wilayah kerja. Indikator yang kedua adalah tinggi badan menurut umur (TB/U) yang menunjukkan masalah gizi yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama (kronis/stunting). Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penurunan angka stunting adalah berkaitan dengan perbaikan gizi pada target 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), antara lain dengan semakin gencar sosialisasi ASI-Eksklusif, pendidikan gizi untuk ibu hamil, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk ibu hamil,

Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA), pemberian zat gizi mikro (taburia), dan perbaikan program penyehatan lingkungan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam program perbaikan gizi pada balita dapat ditunjukkan dari indikator jumlah balita yang ditimbang dibagi jumlah sasaran balita (D/S). Pada tahun 2021, Kota Malang capaian D/S menunjukkan 62,47% di bawah capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 64,31% (Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2021). Pencapaian penimbangan balita (D/S) Kota Malang ini mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2020, yaitu 56,4%. Namun demikian, capaian D/S ini belum memenuhi target RPJMN sebesar 70% dan Indonesia Sehat sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena masih berlangsungnya Pandemi Covid19, sehingga posyandu banyak yang tidak buka serta petugas kesehatan banyak yang terkonfirmasi positif covid-19. Pencapaian cakupan D/S selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada Gambar 4.

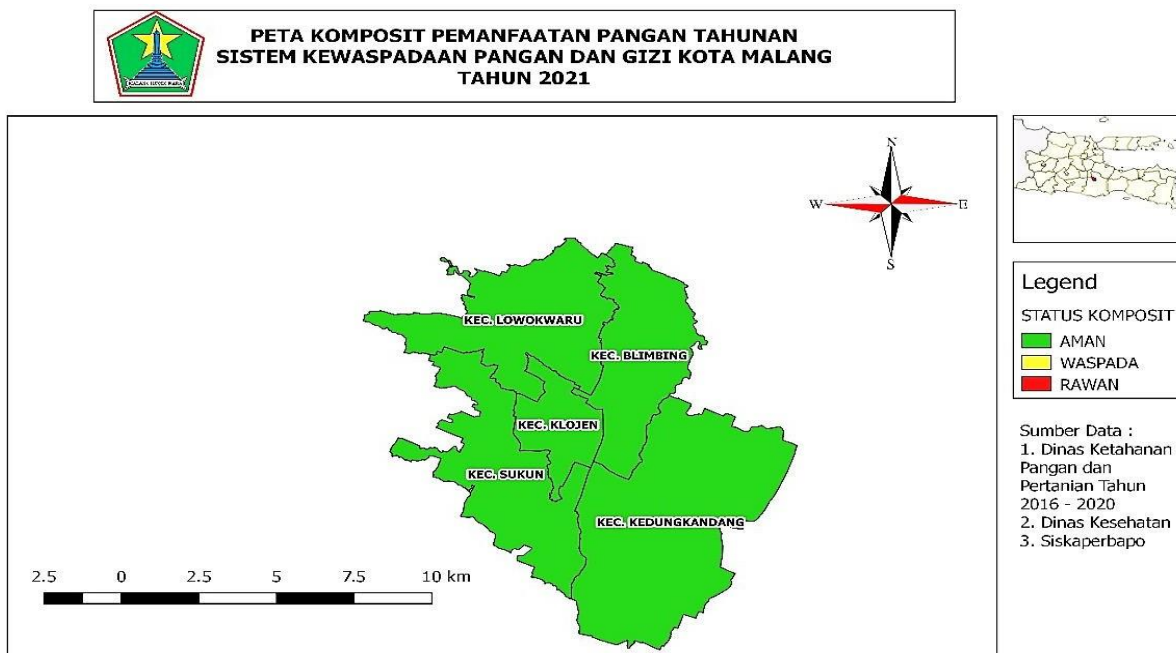


Sumber: Profil Kesehatan Kota Malang, 2021.

Gambar 4. Pencapaian Penimbangan Balita (D/S) Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan Target RPJMN Tahun 2020 – 2021

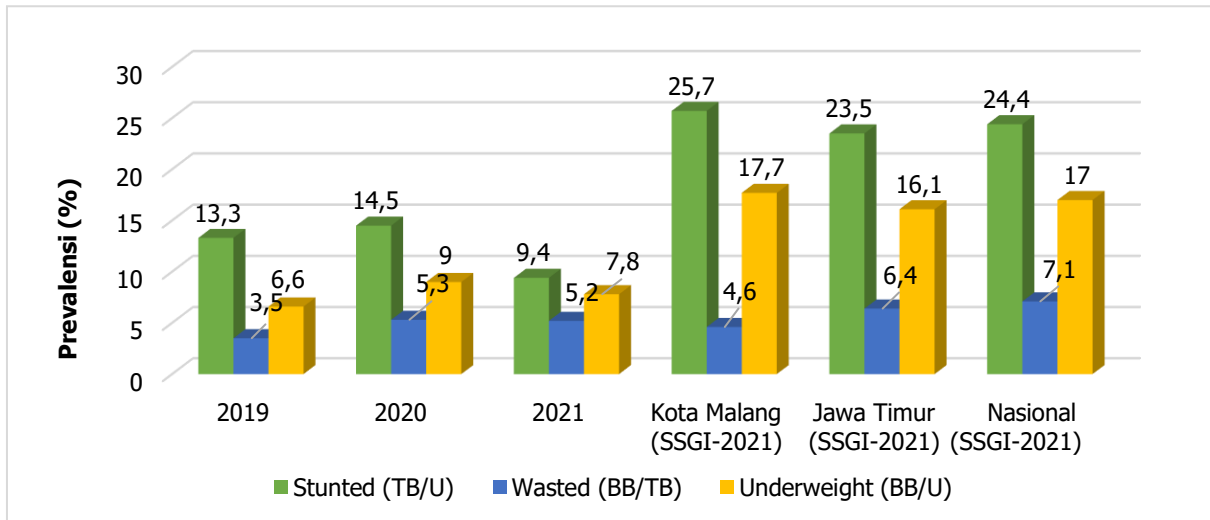
Hasil analisis SKPG Kota Malang Tahun 2021 menunjukkan bahwa hasil analisis indikator SKPG pada aspek pemanfaatan pangan, menunjukkan bahwa peta situasi pangan dan gizi berwarna hijau atau dalam situasi aman, sebagaimana disajikan pada Gambar 5. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari aspek pemanfaatan pangan, Kota Malang terindikasi tahan pangan. Pemanfaatan pangan yang baik merupakan gambaran dari status gizi balita yang dicapai akibat konsumsi pangan yang juga baik. Sebagaimana diketahui dan dibuktikan

melalui beberapa penelitian bahwa status gizi secara langsung dipengaruhi oleh konsumsi pangan serta kondisi kesehatan dan penyakit infeksi (Unicef, 1997 dan Bappenas, 2018). Konsumsi pangan atau asupan zat ini ini sangat dipengaruhi oleh ketahanan pangan rumah tangga yang meliputi ketersediaan pangan (food availability), keterjangkauan/akses pangan (food acces) dan pemanfaatan pangan (food utilizatition). Di samping itu, kelompok balita merupakan kelompok rawan gizi yang sangat mudah terkena masalah gizi, sehingga apabila keadaan gizi balita suatu wilayah baik maka akan menggambarkan keadaan gizi masyarakat tersebut yang juga baik.



Gambar 5. Peta SKPG Aspek Akses Pemanfaatan Pangan Kota Malang Tahun 2021

Gambar 5 menunjukkan bahwa hasil analisis SKPG Kota Malang Tahun 2021 dari aspek pemanfaatan pangan, Kota Malang terindikasi tahan pangan. Namun demikian, Pemerintah Kota Malang harus tetap waspada, mengingat berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, prevalensi *stunting* (Indeks TB/U), *wasting* (Indeks BB/TB), dan *underweight* (Indeks BB/U) Kota Malang masih relatif tinggi dibandingkan Jawa Timur dan Nasional, sebagaimana disajikan pada Gambar 6.



Sumber: Profil Kesehatan Kota Malang. 2021

Gambar 6. Prevalensi (%) Stunted, Wasted, dan Underweight Kota Malang Tahun 2019 – 2021 serta Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional menurut SSGI Tahun 2021

BAB III
METODE PENYUSUNAN SISTEM KEWASPAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)
TAHUNAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup SKPG

1. Pengertian

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan instrument/alat deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah dan memberikan informasi alternative tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan. Di dunia internasional untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya suatu masalah umumnya dikenal dengan istilah Early Warning System (EWS) atau Timely Warning and Intervention System (TWIS). Konsep TWIS di Indonesia diadopsi dan diadaptasi menjadi Sistem Isyarat Dini dan Intervensi (SIDI). Salah satu implementasi SIDI di Indonesia dalam bidang pangan dan gizi dilaksanakan melalui SKPG. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan SKPG pada dasarnya terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang bersifat simultan yang dilaksanakan dalam suatu kerangka waktu tertentu yang mengedepankan pentingnya menemukan isyarat dini agar dapat mencari alternatif intervensi yang relevan dan dilaksanakan tepat waktu. Tiga kegiatan tersebut meliputi: (1) Pengumpulan Data; (2) Pengolahan dan Analisis Data; dan (3) Penyajian dan Desiminasi Informasi.

B. Organisasi Pelaksana SKPG

Pembentukan Pokja SKPG di Kota Malang ditetapkan oleh Walikota Malang sebagai Ketua DKP Kota yang berada di bawah koordinasi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang selaku Sekretaris DKP Kota Malang. Anggota Pokja berasal dari perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan), Bappeda, Sekretaris Daerah atau Asisten dari Unsur Pemda, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Dinas Tenaga Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik, SKPD-KB, Dinas Sosial, Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh), Satuan Pelaksana

Penanggulangan Bencana Alam, Divisi Regional Perum Bulog, dan Kepolisian Resort Kota Malang.

C. Mekanisme Kerja Kegiatan SKPG

1. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam analisis SKPG adalah data sekunder yang dikumpulkan dari instansi terkait. Data tahunan dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) Ketersediaan Pangan, (2) Akses terhadap Pangan, (3) Pemanfaatan Pangan dari Tim SKPG Kota Malang dan Tim Pendata.

2. Indikator SKPG

Indikator SKPG mencakup 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) Ketersediaan Pangan, (2) Akses Pangan, dan (3) Pemanfaatan Pangan serta Data Pendukung Spesifik Lokal, sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Indikator Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Malang – Provinsi Jawa Timur

Aspek	Indikator	Sumber Data
A. Ketersediaan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas tanam komoditas pangan bulan berjalan. 2. Luas tanam komoditas pangan bulan berjalan 5 (lima) tahun terakhir. 3. Luas puso komoditas pangan bulan berjalan. 4. Luas puso komoditas pangan bulan berjalan 5 (lima) tahun terakhir. Catatan: Kota Malang – Provinsi Jawa Timur menggunakan komoditas padi.	<ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian b. Badan Pusat Statistik
B. Akses Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga Beras 2. Harga Jagung 3. Harga Ubi Jalar 4. Harga Ubi Kayu Catatan: Kota Malang – Provinsi Jawa Timur menggunakan harga komoditas pangan beras.	<ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. b. Badan Pusat Statistik c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
C. Pemanfaatan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Balita Ditimbang Terkoreksi (D') 2. Angka Balita Naik Berat Badan (N) 3. Balita yang Tidak Naik Berat Badan dalam 2 (dua) kali Penimbangan berturut-turut (2T) 4. Angka Balita dengan Berat Badan di Bawah Garis Merah (BGM) 	Dinas Kesehatan
D. Data Pendukung Spesifik Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, dll) 2. Data Curah Hujan 3. Kasus Gizi Buruk yang Ditemukan 4. Perubahan Pola Konsumsi Pangan 5. Data Sebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 6. Cadangan Pangan 	<ol style="list-style-type: none"> a. BPBD b. BMKG c. Dinas Kesehatan d. BPS e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian f. Bulog/SKPD Terkait

3. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dimaksudkan untuk mengetahui apakah kondisi indikator pada bulan berjalan menunjukkan indikasi telah terjadi atau memberi tanda-tanda akan terjadinya masalah pangan dan/atau masalah gizi. Oleh karena itu, diperlukan batasan (cut of point) untuk menentukan apakah kondisi pada bulan berjalan dalam kondisi aman, perlu kewaspadaan, atau kondisi rentan.

Kegiatan analisis SKPG Kota Malang – Provinsi Jawa Timur dilaksanakan secara manual. Penyusunan SKPG secara manual menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang sudah dibuat template (form analisis SKPG.xls), sehingga user (petugas/operator input data) menginput data SKPG pada lembar kerja/sheet yang tersedia. Selanjutnya, hasil dari tiap aspek SKPG tersebut divisualisasikan dengan peta menggunakan Aplikasi/Program Quantum GIS (QGIS).

Analisis Data Ketersediaan Pangan

Tabel 8. Analisis Data pada Aspek Ketersediaan Pangan

No.	Analisis	Persentase/r (%)	Bobot
1.	Persentase luas tanam komoditas pangan bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam komoditas pangan bulan bersangkutan 5 (lima) tahun terakhir.	$r \geq 5$	1 = Aman
		$-5 \leq r < 5$	2 = Waspada
		$r < -5$	3 = Rentan
2.	Persentase luas tanam komoditas pangan bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam komoditas pangan bulan bersangkutan 5 (lima) tahun terakhir.	$r < -5$	1 = Aman
		$5 \leq r < -5$	2 = Waspada
		$r > 5$	3 = Rentan

Keterangan:

Apabila tidak terjadi puso (0), maka masuk kategori aman

Analisis Data Akses Pangan

Tabel 9. Analisis Data pada Aspek Akses Pangan

No.	Analisis	Persentase/r (%)	Bobot
1.	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas beras dibandingkan dengan rata-rata harga 3 (tiga) bulan terakhir.	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 10$	2 = Waspada
		$r > 10$	3 = Rentan
2.	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas jagung dibandingkan dengan rata-rata harga 3 (tiga) bulan terakhir.	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		$r > 15$	3 = Rentan
3.	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi kayu dibandingkan dengan rata-rata harga 3 (tiga) bulan terakhir.	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		$r > 15$	3 = Rentan
4.	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi jalar dibandingkan dengan rata-rata harga 3 (tiga) bulan terakhir.	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		$r > 15$	3 = Rentan

Analisis Data Pemanfaatan Pangan

Tabel 10. Analisis Data pada Aspek Pemanfaatan Pangan

No.	Analisis	Persentase/r (%)	Bobot
1.	Persentase Balita yang Naik Berat Badan (N) dibandingkan Jumlah Balita Ditimbang Terkoreksi (D').	$r > 90$	1 = Aman
		$80 \leq r \leq 90$	2 = Waspada
		$r < 80$	3 = Rentan
2.	Persentase Balita yang BGM dibandingkan Jumlah Balita Ditimbang Terkoreksi (D').	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 10$	2 = Waspada
		$r > 10$	3 = Rentan
3.	Persentase Balita yang Tidak Naik Berat Badan dalam 2 (dua) Kali Penimbangan berturut-turut (2T) dibandingkan Jumlah Balita Ditimbang Terkoreksi (D').	$r < 10$	1 = Aman
		$10 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		$r > 20$	3 = Rentan

4. Komposit Hasil Analisis

Aspek Ketersediaan Pangan

Tabel 11. Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Ketersediaan Pangan

	Persentase Rata-rata Luas Tanam Komoditas Pangan Bulan Berjalan Dibandingkan dengan Rata-Rata Luas Tanam Komoditas Pangan Bulanan 5 (Lima) Tahun			
Persentase Rata-rata Luas Puso Komoditas Pangan Bulan Berjalan Dibandingkan dengan Rata-Rata Luas Puso Komoditas Pangan Bulanan 5 (Lima) Tahun	Bobot	1	2	3
	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6

Keterangan:

- a. Skor Komposit 2 = Warna Hijau (Aman)
 Skor Komposit 3 – 4 = Warna Kuning (Waspada)
 Skor Komposit 5 – 6 = Warna Merah (Rentan)
- b. Untuk Daerah yang Memilih Opsi 1, maka Perhitungan Skor Komposit Ketersediaan Pangan adalah 100% untuk Beras.
- c. Untuk Daerah yang Memilih Opsi 2, maka Perhitungan Skor Komposit Ketersediaan Pangan adalah 80% untuk Beras, 10% Komoditas 2, dan 10% Komoditas 3.

Tabel 12. Contoh Interpretasi Hasil Analisis dan Tindak Lanjut pada Aspek Ketersediaan Pangan

Kondisi	Tindak Lanjut
Apabila ditemukan indikator komposit ketersediaan pangan warna kuning (skor komposit 3 – 4) pada bulan berjalan.	Meningkatkan kewaspadaan melalui pemantauan harga beras pada 3 – 4 bulan kedepan.
Apabila ditemukan indikator komposit ketersediaan pangan warna merah (skor komposit 5 – 6) pada bulan berjalan.	<ol style="list-style-type: none"> Tingkatkan kewaspadaan melalui pemantauan harga beras pada 3 – 4 bulan kedepan. Lakukan persiapan kemungkinan diperlukannya tindakan seperti operasi pasar pada 3 – 4 bulan kedepan. Lakukan persiapan kemungkinan dilakukan investigasi pada 3 – 4 bulan kedepan.
Apabila warna merah (skor komposit 5 – 6) disebabkan karena persentase rata-rata luas puso komoditas pangan bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso komoditas pangan bulanan 5 (lima) tahun serta luas puso memiliki bobot 3 (rentan).	Memberi rekomendasi untuk melakukan upaya segera penanggulangan Pengendalian Hama terpadu (PHT) oleh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait.
Apabila warna merah disebabkan persentase (skor komposit 5 – 6) disebabkan karena persentase rata-rata luas tanam komoditas pangan bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam komoditas pangan bulanan 5 (lima) tahun serta indikator luas tanam memiliki bobot 3 (rentan).	Melakukan investigasi penyebab dan upaya segera untuk meningkatkan luas tanam bulan berikutnya.

Aspek Akses Pangan

Tabel 13. Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Akses Pangan untuk Komoditas Tunggal

	Bobot	Keterangan
Komoditas Tunggal	1	Aman
	2	Waspada
	3	Rentan

Tabel 14. Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Akses Pangan untuk Dua Komoditas

	Bobot	Komoditas Ke-1		
		1	2	3
Komoditas Ke-2	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6

Keterangan:

Total Bobot 2 = Warna Hijau (Aman)

Total Bobot 3 – 4 = Warna Kuning (Waspada)

Total Bobot 5 – 6 = Warna Merah (Rentan)

Tabel 15. Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Akses Pangan untuk Tiga Komoditas

Komoditas Ke-3	Komoditas Ke-1 dan Ke-2					
	Bobot	2	3	4	5	6
1	3	4	5	6	7	8
2	4	5	6	7	8	9
3	5	6	7	8	9	9

Keterangan:

Total Bobot 3 – 4 = Warna Hijau (Aman)

Total Bobot 5 – 6 = Warna Kuning (Waspada)

Total Bobot 7 – 9 = Warna Merah (Rentan)

Tabel 16. Contoh Interpretasi Hasil Analisis dan Tindak Lanjut pada Aspek Akses Pangan

Kondisi	Tindak Lanjut
Pada indikator tunggal harga beras, apabila ditemukan warna kuning/bobot 2 (waspada) pada bulan berjalan.	Mewaspadaai kemungkinan penurunan N/D' pada 2 – 4 bulan berikutnya.
Pada indikator tunggal harga beras, apabila ditemukan warna merah/bobot 3 (rentan) pada bulan berjalan.	a. Mewaspadaai kemungkinan penurunan N/D' pada 2 – 4 bulan berikutnya dan peningkatan BGM/D' . b. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang menangani bidang kesehatan.
Apabila ditemukan indikator komposit akses pangan berwarna kuning pada bulan berjalan (untuk dua atau tiga indikator).	Meningkatkan kewaspadaan melalui pemantauan N/D' 2 – 4 bulan kedepan.
Apabila ditemukan indikator komposit akses pangan berwarna merah pada bulan berjalan (untuk dua atau tiga indikator).	a. Mewaspadaai kemungkinan penurunan N/D' pada 2 – 4 bulan berikutnya dan peningkatan BGM/D' . b. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang menangani bidang kesehatan.

Keterangan: Tindak lanjut disesuaikan dengan hasil rapat Tim/Pokja SKPG

Aspek Pemanfaatan Pangan

Tabel 17. Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Pemanfaatan Pangan

Hasil Analisis Ke-3	Hasil Analisis Ke-1 dan Ke-2					
	Bobot	2	3	4	5	6
1	3	4	5	6	7	8
2	4	5	6	7	8	9
3	5	6	7	8	9	9

Keterangan:

Total Bobot 3 – 4 = Warna Hijau (Aman)

Total Bobot 5 – 6 dan tidak ada Bobot 3 pada BGM/D' dan 2T/D' = Warna Kuning (Waspada)

Total Bobot 5 – 9 dan ada Bobot 3 pada BGM/D' dan 2T/D' = Warna Merah (Rentan)

Tabel 18. Contoh Interpretasi Hasil Analisis dan Tindak Lanjut pada Aspek Pemanfaatan Pangan

Kondisi	Tindak Lanjut
Apabila ditemukan indikator komposit pemanfaatan pangan berwarna kuning (bobot 5 – 6 tidak ada bobot 3) pada bulan berjalan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Segera melakukan upaya-upaya persiapan untuk kemungkinan memburuknya status gizi balita pada bulan berikutnya. b. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang menangani kesehatan.
Apabila ditemukan indikator komposit pemanfaatan pangan berwarna merah (bobot 5 – 9 ada bobot 3) pada bulan berjalan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengambil tindakan relevan yang diperlukan seperti PMT Pemulihan atau tindakan lain yang diperlukan untuk Balita BGM atau 2T. b. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang menangani bidang pemberdayaan di provinsi atau kabupaten/kota untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan kesehatan bagi keluarga dengan balita BGM.

Keterangan: Tindak lanjut disesuaikan dengan hasil rapat Tim/Pokja SKPG

Data Pendukung Spesifik Lokal

Gejala terjadinya rawan pangan dan gizi yang dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Suatu daerah dikatakan aman apabila tidak terjadi perubahan indikator lokal yang signifikan dibandingkan dengan kondisi normal. Daerah dikatakan waspada apabila terjadi perubahan indikator lokal yang melebihi kondisi normal. Daerah dapat disebut rentan apabila terjadi perubahan indikator yang sangat ekstrim melebihi kondisi normal.

Beberapa indikator lokal yang secara umum dapat memberikan indikasi adanya perubahan potensi kerawanan pangan adalah:

- 1) Perubahan pola konsumsi pangan yang bernilai sosial lebih rendah atau tidak lazim dikonsumsi dalam kondisi normal bukan dalam rangka diversifikasi konsumsi pangan (misal, meningkatnya campuran jagung atau ubi kayu dalam nasi, berkurangnya frekuensi makan, konsumsi umbi-umbian hutan seperti gadung, dll).
- 2) Data kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi, dll)
- 3) Data curah hujan
- 4) Kasus gizi buruk yang ditemukan
- 5) Data sebaran OPT
- 6) Cadangan pangan
- 7) Dan sebagainya

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)

A. Analisis Indikator SKPG

Kota Malang sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keragaman agro ekosistem, sosial budaya, pangan dan kerentanan terhadap bencana alam yang cukup tinggi, memiliki potensi mengalami kerawanan pangan kronis maupun transien. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya rentan rawan pangan sangat diperlukan untuk mencegah dampak yang berakibat terjadinya rawan pangan dan gizi. Dalam penanganan kerawanan pangan, salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi situasi pangan dan gizi secara dini melalui analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. SKPG dilaksanakan melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan analisis yang mendalam.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Konsep ketahanan pangan dan gizi dibangun berdasarkan atas tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

1. Aspek Ketersediaan Pangan

Produksi dan ketersediaan pangan merupakan kemampuan masyarakat dan negara dalam menyediakan pangan dari produksi domestik maupun dari luar (Kota/Kabupaten, Provinsi, atau luar negeri/impor). Ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional atau wilayah merupakan unsur penting dalam membangun ketahanan pangan dan gizi. Namun demikian, ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional dan provinsi tidak secara otomatis menjamin ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan individu.

Pangan dapat tersedia dan diakses secara fisik, namun sebagian anggota rumah tangga mungkin tidak mendapat manfaat secara maksimal apabila kelompok ini tidak memperoleh distribusi pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun keragaman atau

apabila kondisi tubuh tidak memungkinkan penyerapan pangan karena penyiapan pangan yang tidak tepat atau karena sedang sakit. Oleh karena itu, dua aspek lain ketahanan pangan yaitu akses pangan dan pemanfaatan pangan merupakan unsur yang sama pentingnya dengan produksi dan ketersediaan pangan. Selanjutnya, analisis aspek ketersediaan dengan indikator luas tanam komoditas pangan dan luas puso komoditas pangan tahun berjalan serta 5 tahun terakhir masing-masing disajikan pada Tabel 19 dan Tabel 20.

Tabel 19. Luas Tanam Komoditas Pangan Rata-rata 5 Tahun Terakhir (2017 – 2021) dan Tahun Berjalan (2022)

No.	Kecamatan	Luas Tanam Komoditas Padi (Ha)							r	Bobot
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata 5 Tahun Terakhir	Tahun 2022		
1.	Kedungkandang	734	795	790	1.047	868	847	868	2,5	1
2.	Sukun	571	587	576	490	423	529	423	-20,1	3
3.	Klojen	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2
4.	Blimbing	219	213	213	213	196	211	196	-7,0	3
5.	Lowokwaru	621	621	631	638	675	637	675	5,9	1
Jumlah		2.145	2.216	2.210	2.388	2.162	2.224	2.162	-2,8	2

Tabel 20. Luas Puso Komoditas Pangan Rata-rata 5 Tahun Terakhir (2017 – 2021) dan Tahun Berjalan (2022)

No.	Kecamatan	Luas Puso Komoditas Padi (Ha)							r	Bobot
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata 5 Tahun Terakhir	Tahun 2022		
1.	Kedungkandang	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1
2.	Sukun	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1
3.	Klojen	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1
4.	Blimbing	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1
5.	Lowokwaru	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0,0	1

Tabel 19 menunjukkan bahwa nilai rasio (r) luas tanam komoditas padi tahun berjalan dengan rata-rata luas tanam komoditas padi 5 tahun terakhir Kota Malang Tahun 2022 sebesar -2,8 dengan bobot 2 masuk dalam kategori waspada. Berdasarkan wilayah kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru dalam kategori aman, namun demikian Kecamatan Sukun dan Kecamatan Blimbing dalam

kategori rentan. Sedangkan, Tabel 20 menunjukkan bahwa nilai rasio (r) luas puso komoditas padi tahun berjalan dengan rata-rata luas puso komoditas padi 5 tahun terakhir Kota Malang Tahun 2022 sebesar 0,0 dengan bobot 1 masuk dalam kategori aman yang berarti sepanjang tahun 2017 – 2022 tidak pernah terjadi puso, yang menyebar di semua wilayah kecamatan.

Hasil analisis SKPG Tahun 2022 Kota Malang pada aspek ketersediaan pangan sebagaimana disajikan pada Tabel 21 menunjukkan bahwa Indeks Ketersediaan Pangan (IKP) dalam kategori waspada. Berdasarkan wilayah kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru dalam kategori aman.

Tabel 21. Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Ketersediaan Pangan Kota Malang Tahun 2022

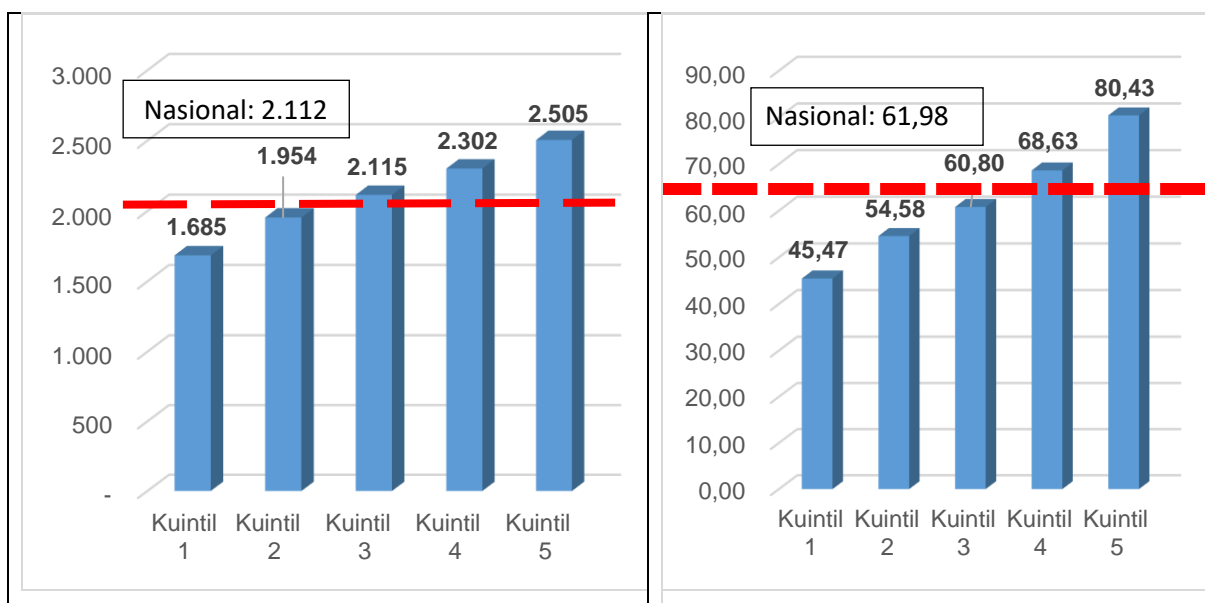
No.	Kecamatan	Bobot Komposit	Keterangan Komposit	Indeks Ketersediaan Pangan (IKP)
1.	Kedungkandang	2	Aman	1
2.	Sukun	4	Waspada	2
3.	Klojen	3	Waspada	2
4.	Blimbing	4	Waspada	2
5.	Lowokwaru	2	Aman	1
Kota Malang		3	Waspada	2

Hasil analisis SKPG Tahun 2022 Kota Malang pada aspek ketersediaan pangan menunjukkan bahwa Indeks Ketersediaan Pangan (IKP) dalam kategori waspada. Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi makro ketahanan pangan nasional yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan situasi sangat baik, khususnya apabila dilihat dari ketersediaan pangan setara energi (Kalori/kapita/hari) dan protein (gram/kapita/hari) yang telah melampaui rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 energi 2.400 Kalori/kapita/hari dan protein 62 gram/kapita/hari.

Ketersediaan energi dan protein Nasional telah mencapai 2.755 Kalori/kapita/hari melampaui rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 energi 2.400 Kalori/kapita/hari dan konsumsi energi telah mencapai 2.112 Kalori/kapita/hari melampaui rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 energi 2.100 Kalori/kapita/hari. Demikian juga untuk ketersediaan protein Nasional telah mencapai 81,4 gram/kapita/hari melampaui rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 protein 62 gram/kapita/hari dan konsumsi protein telah mencapai 61,98 gram/kapita/hari melampaui rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 protein 57 gram/kapita/hari. Angka Konsumsi Energi (AKE) dan Angka Konsumsi

Protein (AKP) Nasional menurut Kuintil Pendapatan Tahun 2020 masing-masing disajikan pada Gambar 7 dan Gambar 8.

Kota Malang sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati (biodiversity) dan dukungan kondisi geografis yang beragam, iklim dan cuaca yang mendukung, serta keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan untuk dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak khususnya di Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru, serta potensi sumber daya manusia yang telah mencapai 844.933 jiwa pada tahun 2021, maka semangat pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk Kota Malang sepantasnya dapat diwujudkan dengan keterlibatan multi sektor dan multi pemangku kepentingan.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020

Gambar 7. Angka Konsumsi Energi/AKE (Kalori/Kapita/Hari)

Gambar 8. Angka Konsumsi Protein/AKP (Gram/Kapita/Hari)

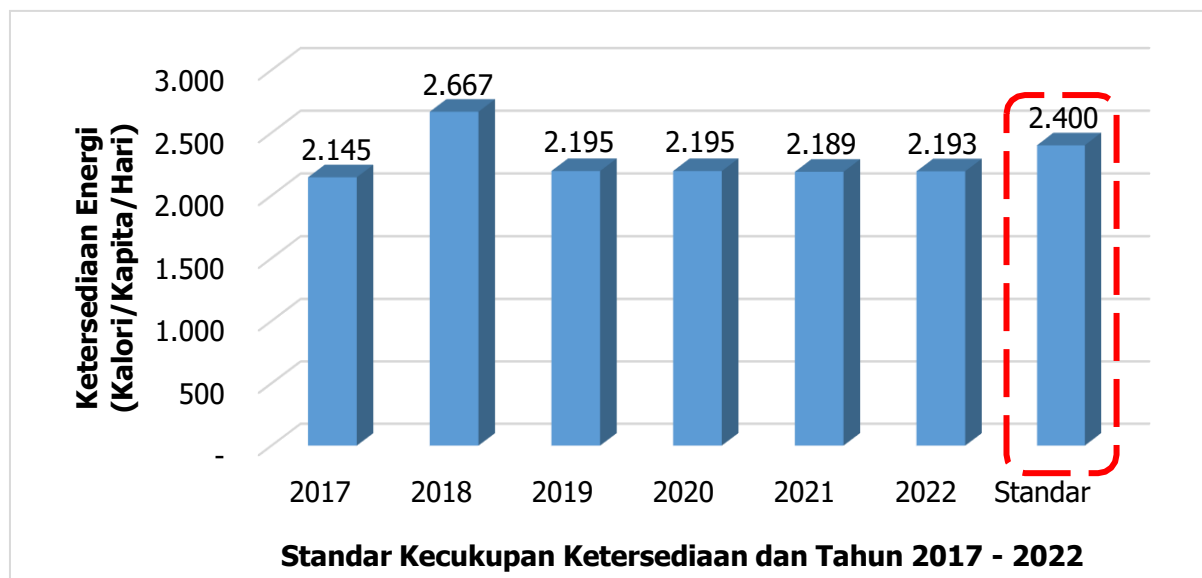
Secara Nasional, dampak Pandemi Covid-19 telah memberikan kondisi yang kurang stabil terkait keterjangkauan pangan, sebagaimana disajikan pada Gambar 7. AKE Tahun 2020 sebesar 2.112 Kalori/kapita/hari di atas anjuran 2.100 Kalori/kapita/hari, namun untuk komoditas umbi-umbian, pangan hewani, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah masih belum mencapai AKE Standar/Ideal. Sedangkan, untuk padi-padian serta minyak dan lemak telah melampaui AKE Standar/Ideal. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) atau kelaparan nyata, yaitu kondisi masyarakat kekurangan konsumsi energi.

Sebelum terjadi Pandemi Covid-19, PoU menurun dari 19,2% pada tahun 2005 menjadi 7% pada tahun 2019 (World Bank, 2020), meskipun sedikit meningkat lagi menjadi

8,49% pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Ketika Pandemi Covid-19 mulai mereda, dunia saat ini dihadapkan pada isu krisis pangan global akibat perang Rusia dan Ukraina serta inflasi yang meroket di banyak negara. Apabila krisis pangan ini terjadi, tentu sangat mengkhawatirkan karena dapat memicu terjadinya kelaparan pada kelompok rentan di berbagai belahan dunia, bahkan mungkin juga dapat terjadi pada kelompok paling rentan di Indonesia, termasuk Kota Malang. Namun sangat disayangkan, data konsumsi energi dan protein penduduk Kota Malang belum tersedia secara berkesinambungan, sehingga belum dapat dianalisis Prevalence of Undernourishment (PoU) atau kelaparan nyata.

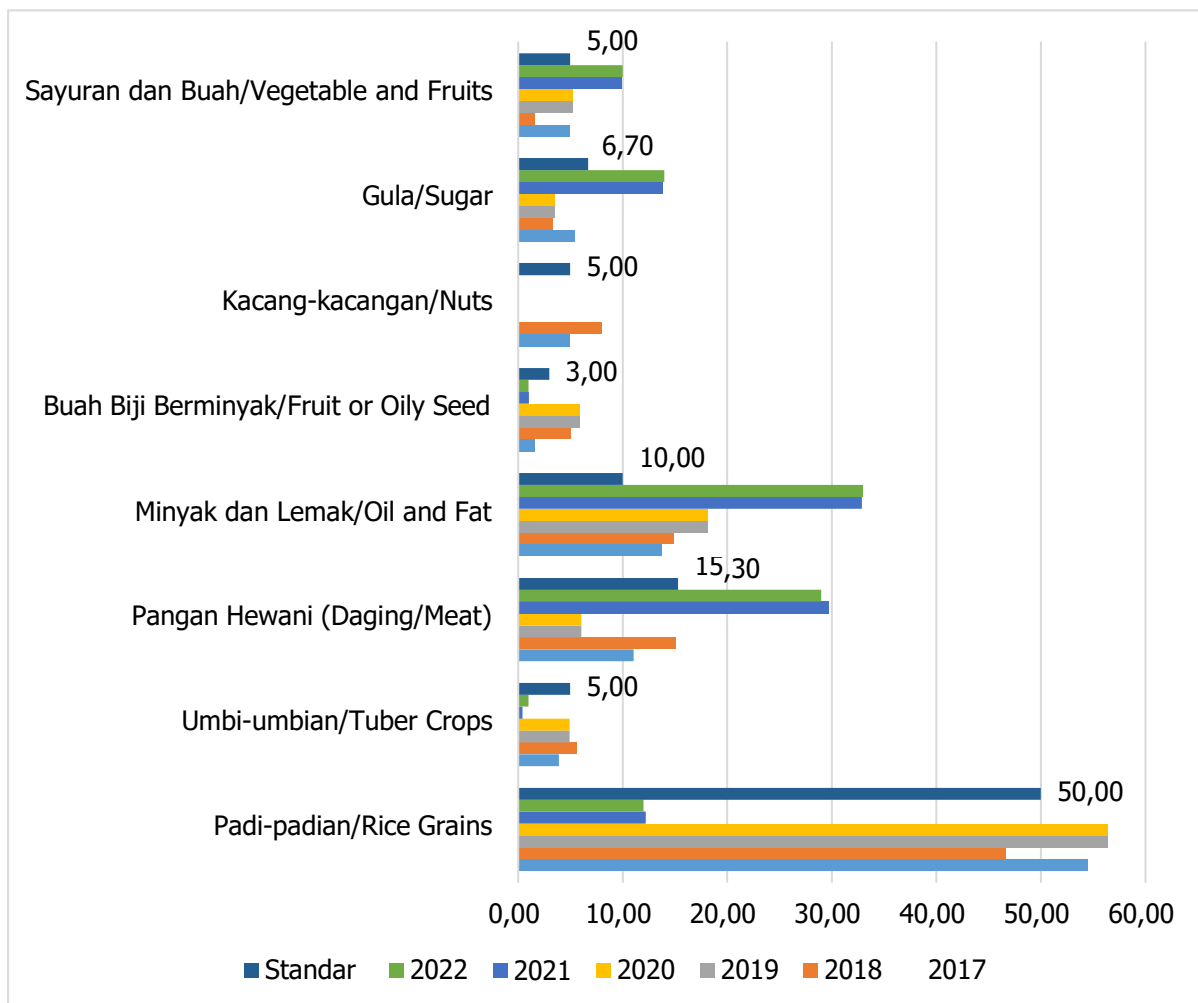
Perkembangan Kecukupan Ketersediaan Energi (Kalori/Kapita/Hari)

Ketersediaan energi (Kalori/kapita/hari) di Kota Malang periode tahun 2017 – 2022 cenderung menurun dan masih di bawah standar kecukupan ketersediaan energi rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 sebesar 2.400 Kalori/kapita/hari, kecuali pada tahun 2018 Kota Malang telah melampaui rekomendasi WNPG XI Tahun 2018 sebesar 2.667 Kalori/kapita/hari dan mencapai ketahanan pangan berdasarkan aspek ketersediaan energi. Sedangkan, ketersediaan energi pada tahun 2019 – 2022 masih di bawah standar kecukupan ketersediaan energi, yang berarti belum mencapai ketahanan pangan, sebagaimana disajikan pada Gambar 9. Demikian juga dengan kontribusi masing-masing kelompok pangan terhadap total energi belum berimbang (Gambar 10).



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang Tahun 2018 – 2022

Gambar 9. Standar Kecukupan dan Ketersediaan Energi (Kalori/Kapita/Hari) Kota Malang Tahun 2017 – 2022



Gambar 10. Kontribusi masing-masing Kelompok Pangan terhadap Total Energi pada Standar Kecukupan dan Ketersediaan Energi (Kalori/Kapita/Hari) Kota Malang Tahun 2017 – 2022

2. Aspek Akses Pangan

Akses pangan merupakan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan maupun kombinasi. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan. Dimensi aksesibilitas pangan merupakan dimensi kompleks yang terkait dengan produksi pangan, ketersediaan pangan, dan distribusi pangan. Faktor lain untuk menjamin aksesibilitas pangan adalah kemampuan ekonomi masyarakat.

Kota Malang Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah perkotaan yang minim lahan pertanian sebagaimana disajikan dalam analisis SKPG pada aspek ketersediaan pangan dalam kategori waspada, sehingga ketersediaan pangan di Kota Malang sangat bergantung dari pasokan hasil pertanian daerah lain. Untuk menjamin keterjangkauan akses pangan

masyarakat, Pemerintah Kota Malang harus memastikan bahwa ketersediaan pangan ada secara fisik dan telah terdistribusi dengan baik serta menjaga harga pangan tetap stabil. Pada kondisi masyarakat tidak mampu menjangkau pangan akibat kondisi ekonomi, maka diperlukan upaya Pemerintah Kota Malang untuk menjamin akses pangan dengan memberikan jaminan sosial dan pemberdayaan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri pangan.

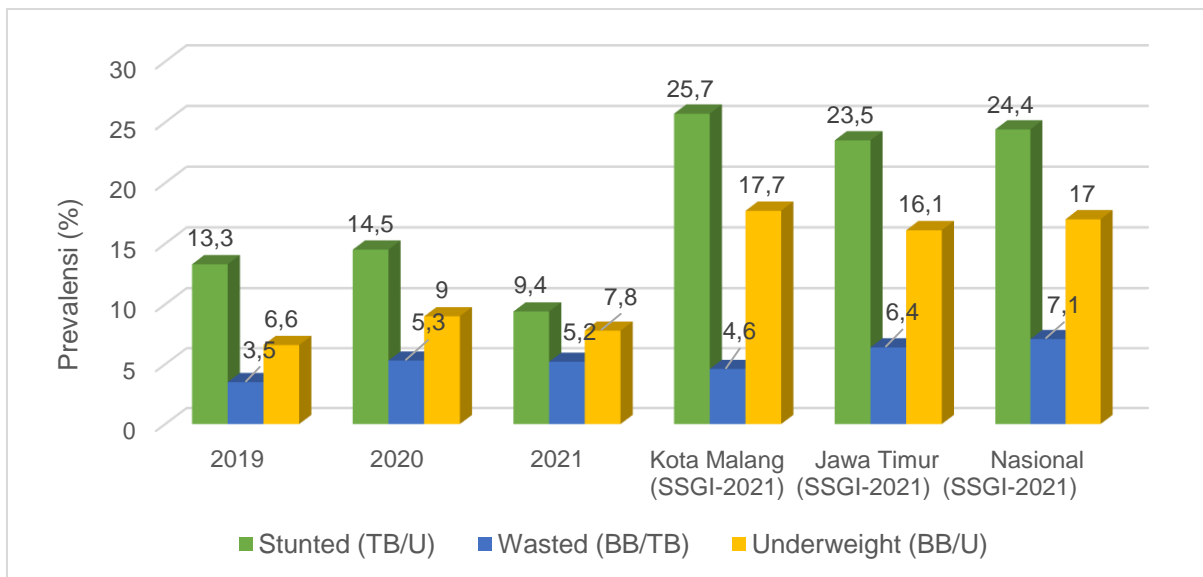
Berdasarkan hasil analisis SKPG Kota Malang Tahun 2022 pada aspek ketersediaan pangan yang masih di bawah standar kecukupan ketersediaan energi rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 sebesar 2.400 Kalori/kapita/hari (Gambar 9), demikian juga dengan keberagaman ketersediaan pangan yang diukur menggunakan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih rendah serta kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan yang belum seimbang (Gambar 10), maka dirumuskan peningkatan aksesibilitas pangan dengan 5 (lima) strategi pemenuhan, yaitu:

- 1) Meningkatkan Produksi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang (Aspek Ketersediaan Pangan)
- 2) Memperkuat Cadangan Pangan untuk Antisipasi Ancaman Ketersediaan Pangan (Aspek Ketersediaan Pangan)
- 3) Meningkatkan Keterjangkauan Fisik (Aspek Keterjangkauan/Akses Pangan)
- 4) Meningkatkan Keterjangkauan Ekonomi (Aspek Keterjangkauan/Akses Pangan)
- 5) Meningkatkan Keterjangkauan Sosial (Aspek Keterjangkauan/Akses Pangan)

Tabel 22. Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Akses Pangan Kota Malang Tahun 2022

No.	Komoditas	Harga Rata-rata Bulan Berjalan (November 2022) di Tingkat Konsumen (Rp/Kg)	Harga Rata-rata 3 Bulan Terakhir (Rp/Kg)	Harga Rata-rata Bulan Berjalan Dibandingkan Harga Rata-rata 3 Bulan Terakhir (%)	Bobot
1	2	3	4	$5 = \{(3/4) \times 100\} - 100$	6
1.	Kedungkandang	11.000	11.033	-0,3	1
2.	Sukun	11.000	11.033	-0,3	1
3.	Klojen	11.500	11.667	-1,43	1
4.	Blimbing	11.000	11.033	-0,3	1
5.	Lowokwaru	11.000	11.000	0	1
Kota Malang		11.000	11.155	-1,39	1

Hasil analisis SKPG Tahun 2022 Kota Malang pada aspek akses pangan menunjukkan bahwa Indeks Akses Pangan (IAP) dalam kategori aman, sebagaimana disajikan pada Tabel 22. Namun demikian, tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan masalah gizi sebagai akibat kuantitas dan keragaman konsumsi pangan yang tidak memadai atau tidak memenuhi standar kecukupan konsumsi yang dianjurkan, sebagaimana disajikan pada Gambar 11.



Sumber: Profil Kesehatan Kota Malang. 2021

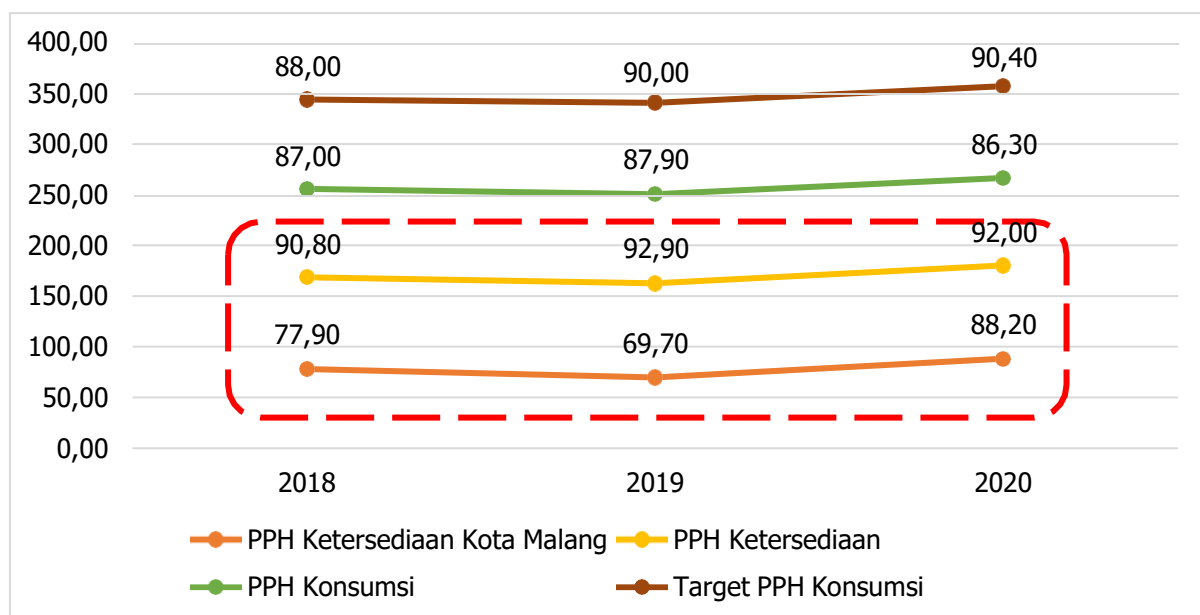
Gambar 11. Prevalensi (%) Stunted, Wasted, dan Underweight Kota Malang Tahun 2019 – 2021 serta Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional menurut SSGI Tahun 2021

3. Aspek Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga, dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi (konversi zat gizi secara efisien oleh tubuh). Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyiapan pangan termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahan. Selain itu, perlu diperhatikan kondisi higienis, budaya atau kebiasaan pemberian makanan terutama untuk individu yang memerlukan jenis pangan khusus, distribusi pangan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dan lain-lain) serta status kesehatan.

Konsumsi pangan yang beragam sangat penting karena tubuh manusia memerlukan beragam jenis zat gizi yang bersumber dari berbagai jenis makanan dan minuman. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan

kualitas konsumsi pada tingkat yang lebih luas baik wilayah, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Gambar 12 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, PPH konsumsi masih di bawah target konsumsi meskipun ketersediaan pangan sudah melebihi target kebutuhan. PPH ketersediaan mencapai skor 92 di atas skor PPH konsumsi mencapai skor 86,3 berdasarkan Angka Kecukupan Konsumsi 2.100 Kalori/kapita/hari. Sedangkan, Gambar 12 juga menunjukkan skor PPH Ketersediaan Kota Malang Tahun 2018 – 2020 yang masih jauh di bawah target PPH Ketersediaan dan Konsumsi.



Gambar 12. Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Nasional menurut AKE 2.100 Kalori/Kapita/Hari Tahun 2018 – 2020

Gambar 12 menunjukkan bahwa skor PPH Ketersediaan Kota Malang Tahun 2020 sebesar 88,20 masih di bawah target PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi sebesar 90,40 merupakan tantangan yang masih dihadapi, yang selanjutnya akan mempengaruhi rendahnya kualitas ketersediaan maupun konsumsi pangan, serta masih terbatasnya akses yang memadai bagi masyarakat miskin dan berpendidikan rendah dalam memperoleh pangan yang bergizi dan aman.

Masalah gizi sangat terkait dengan ketersediaan dan aksesibilitas pangan penduduk. BPS Kota Malang Tahun 2022 melaporkan bahwa pada tahun 2021 jumlah kelurahan dengan kategori kerawanan pangan dari cukup tahan/quite resistant hingga sangat rawan/very vulnerable sebesar 37 kelurahan (64,9%) dari 57 kelurahan di Kota Malang, meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 hanya sebesar 5,3%. Rendahnya aksesibilitas pangan (kemampuan rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya)

mengancam penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi-seimbang, dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya akan berdampak pada semakin beratnya masalah kurang gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak. Selanjutnya, analisis aspek pemanfaatan dengan indikator 1) Jumlah Balita yang Naik Berat Badan (N) dibanding dengan Jumlah Balita Ditimbang Terkoreksi (D'), 2) Jumlah Balita yang BGM dibanding dengan Jumlah Balita Ditimbang Terkoreksi (D'), dan 3) Jumlah Balita yang Tidak Naik Berat Badan dalam 2 Kali Penimbangan Berturut-turut (2T) dibanding dengan Jumlah Balita Ditimbang Terkoreksi (D') sebagaimana disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Jumlah Balita yang Naik Berat Badan (N), Jumlah Balita yang BGM, dan 3) Jumlah Balita yang Tidak Naik Berat Badan dalam 2 Kali Penimbangan Berturut-turut (2T) dibanding dengan Jumlah Balita Ditimbang Terkoreksi (D')

No.	Kecamatan	Jumlah Balita	Jumlah Balita Ditimbang (D)	Jumlah Balita BB Naik (N)	Jumlah Balita BGM	Balita yang Tidak Naik BB dalam 2 Kali Penimbangan Berturut-turut (2T)	Pencapaian (%)		
							N/D	BGM/D	2T/D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kedungkandang	14237	9058	5425	89	2468	59,89	0,98	27,25
2.	Sukun	13679	9591	5731	73	3588	59,75	0,76	37,41
3.	Klojen	6986	3127	1446	42	1531	46,24	1,34	48,96
4.	Blimbing	12388	7338	3793	102	3804	51,69	1,39	51,84
5.	Lowokwaru	11424	9495	2887	92	2739	30,41	0,97	28,85
Jumlah		58714	38609	19282	398	14130	49,94	1,03	36,60

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2022.

Tabel 24. Bobot dan Keterangan Komposit pada Aspek Pemanfaatan Pangan Kota Malang Tahun 2022

No.	Kecamatan	Bobot Komposit	Keterangan Komposit	Indeks Ketersediaan Pangan (IKP)
1.	Kedungkandang	7	Rentan	3
2.	Sukun	7	Rentan	3
3.	Klojen	7	Rentan	3
4.	Blimbing	7	Rentan	3
5.	Lowokwaru	7	Rentan	3
Kota Malang		7	Rentan	3

Tabel 23 dan Tabel 24 menunjukkan bahwa hasil analisis SKPG Kota Malang Tahun 2022 pada skor komposit aspek pemanfaatan pangan dalam keadaan rentan. Hal ini

disebabkan karena rasio jumlah balita berat badan naik (N) dibanding dengan jumlah balita ditimbang terkoreksi (D') kurang dari 80% dan rasio jumlah balita yang tidak naik berat badan dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T) dibanding dengan jumlah balita ditimbang terkoreksi (D') lebih besar dari 20%.

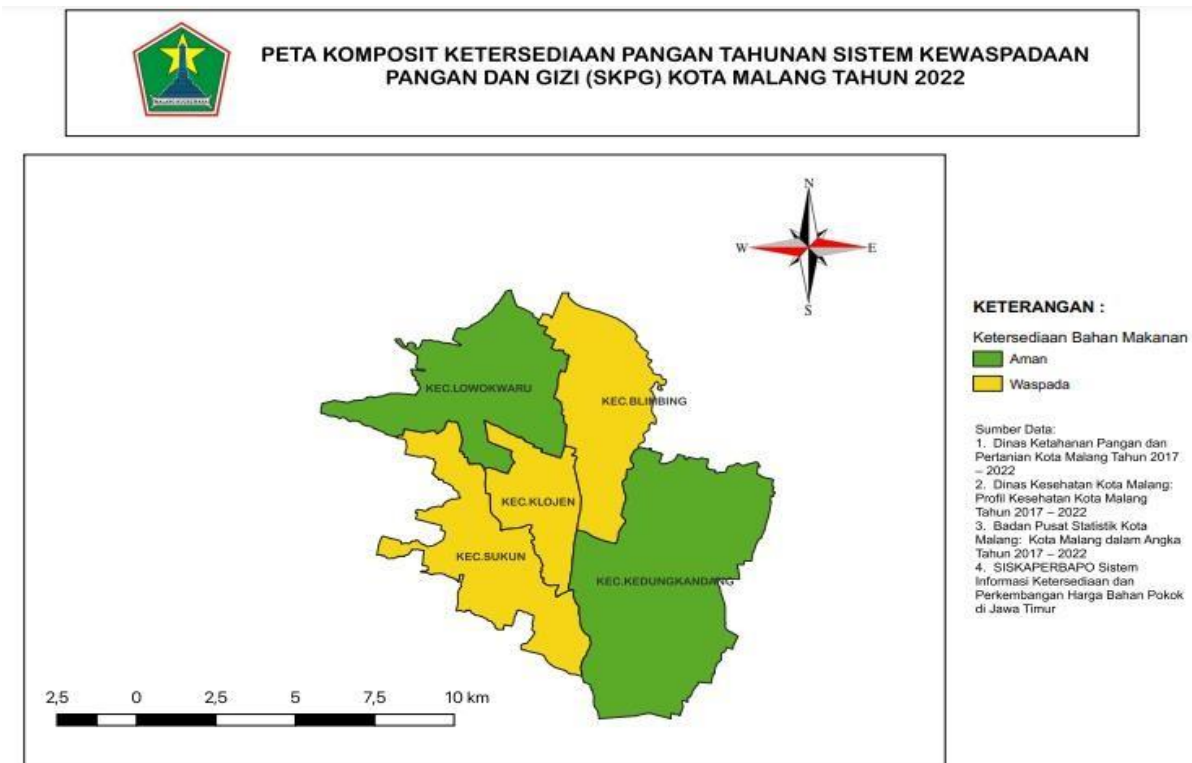
B. Peta Situasi Pangan dan Gizi

1. Aspek Ketersediaan Pangan

Produksi pangan berdampak pada kecukupan ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk setiap tahun. Pemenuhan kecukupan ketersediaan dan konsumsi penduduk dilihat melalui capaian pemenuhan terhadap standar anjuran rekomendasi WNPG XI Tahun 2018, yaitu ketersediaan energi 2.400 Kalori/kapita/hari dan konsumsi energi 2.100 Kalori/kapita/hari serta ketersediaan protein 62 gram/kapita/hari dan konsumsi protein 57 gram/kapita/hari.

Hasil analisis indikator SKPG pada aspek ketersediaan pangan Kota Malang Tahun 2022, menunjukkan bahwa masih ditemukan 3 (tiga) wilayah Kecamatan Sukun, Klojen, dan Blimbing dalam peta situasi pangan dan gizi berwarna kuning atau dalam situasi waspada, sebagaimana disajikan pada Gambar 13. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari aspek ketersediaan pangan, Kota Malang terindikasi rawan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang harus segera melakukan investigasi apakah permasalahan yang timbul pada aspek ketersediaan pangan pada tahun 2022 telah sampai pada tahap membutuhkan upaya penanganan intervensi. Jika Ya, maka harus segera menetapkan jenis intervensi yang tepat. Namun jika Tidak, maka monitoring dan evaluasi situasi pangan dan gizi secara berkala dan berkelanjutan untuk segera ditindak lanjuti. Sedangkan, wilayah Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru dalam kategori aman.

Peta SKPG Aspek Ketersediaan Pangan Kota Malang Tahun 2022 menunjukkan peningkatan jumlah wilayah kecamatan dalam kategori aman, yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru jika dibandingkan dengan peta SKPG Aspek Ketersediaan Pangan Kota Malang Tahun 2021. Peningkatan pencapaian wilayah kecamatan dalam kategori aman ini merupakan upaya intervensi yang tepat yang telah direkomendasikan pada tahun 2021, yaitu peningkatan program pertanian perkotaan secara massif dan berkelanjutan antara lain berupa pemanfaatan lahan kritis/lahan tidak produktif dan peternakan milenial oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Bidang Peternakan.



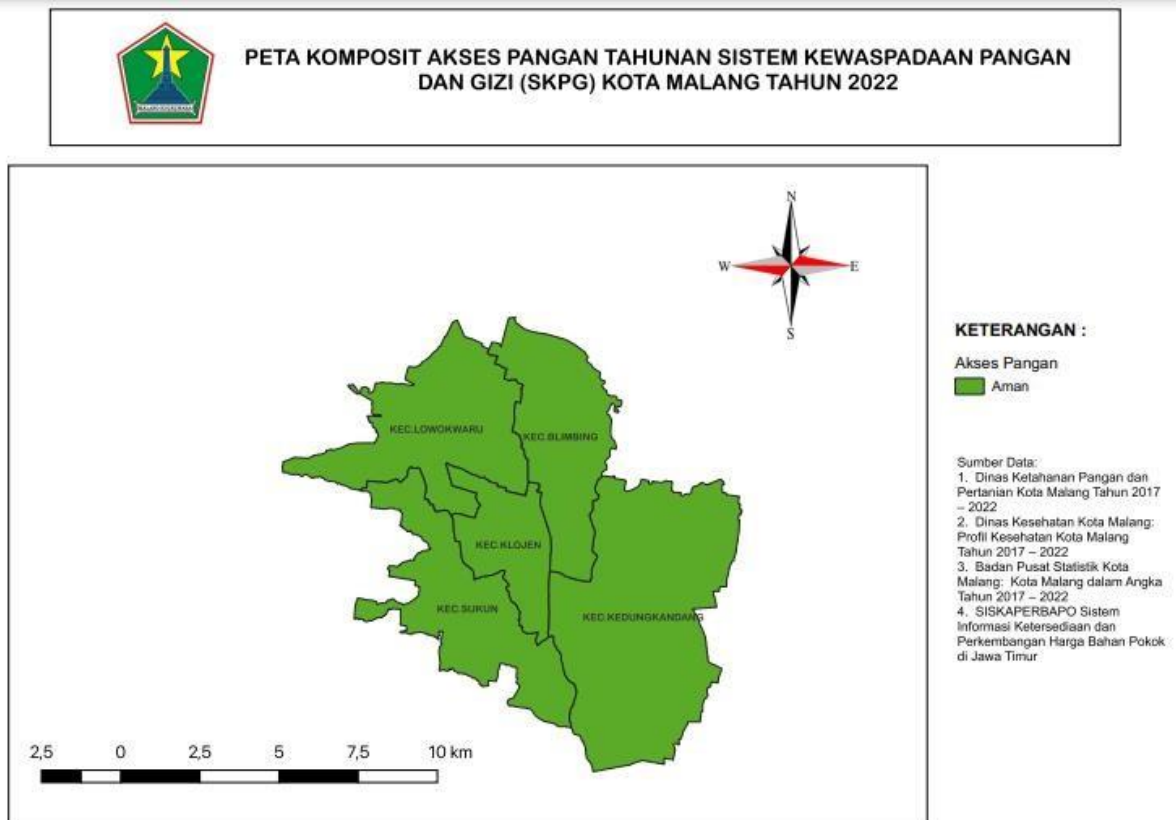
Gambar 13. Peta SKPG Aspek Ketersediaan Pangan Kota Malang Tahun 2022

2. Aspek Akses Pangan

Hasil analisis SKPG Kota Malang Tahun 2022 menunjukkan bahwa indikator SKPG pada aspek akses pangan, peta situasi pangan dan gizi berwarna hijau atau dalam situasi aman, sebagaimana disajikan pada Gambar 14. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari aspek akses pangan, Kota Malang terindikasi tahan pangan. Di dalam masyarakat, harga suatu komoditas dan pendapatan masyarakat merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi permintaan (demand), dimana permintaan suatu komoditas dapat dilihat dari pembelanjaan/pengeluaran total suatu masyarakat. Sehingga, apabila ada perubahan harga dan perubahan pendapatan suatu rumah tangga (masyarakat), maka pengeluaran rumah tangga (masyarakat) juga akan berubah.

Salah satu pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk makanan. Makanan telah dijadikan indikator oleh ahli ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Seperti Ernest Engel, yang dikenal dengan hukum Engel, menyebutkan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka proporsi pengeluaran masyarakat untuk makanan semakin kecil. Dengan kata lain, seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk non-makanan. Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena

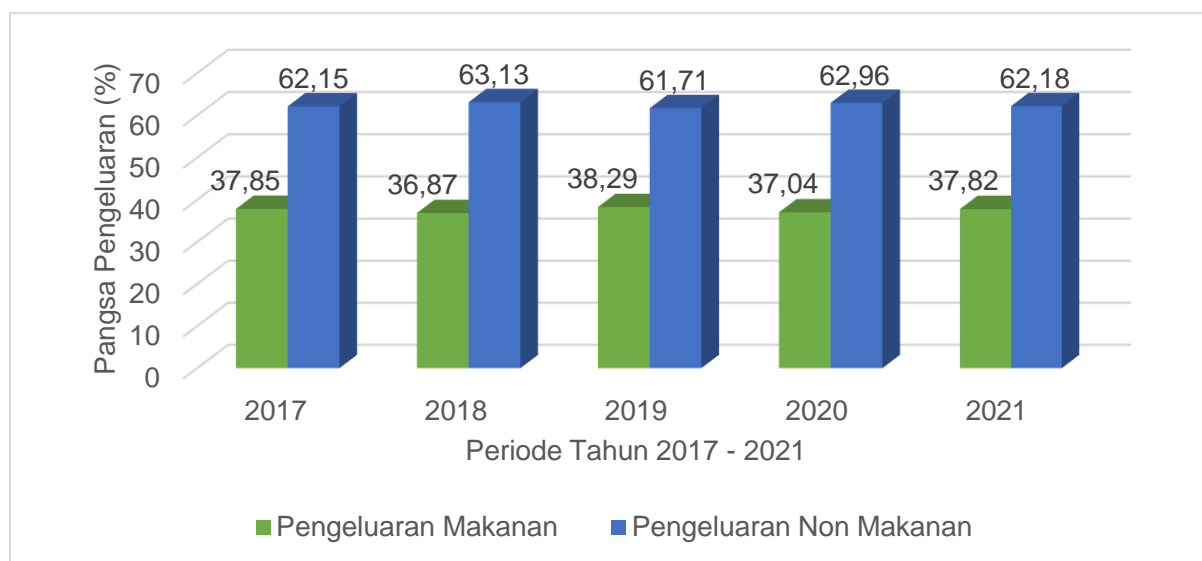
elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah. Dengan demikian, pangsa (share) pengeluaran makanan rumah tangga merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran masyarakat. Sehingga pangsa (dalam %) pengeluaran untuk makanan semakin kecil, maka tingkat kemakmuran masyarakat dikatakan makin membaik. Selanjutnya, Gambar 15 menunjukkan pangsa pengeluaran makanan di Kota Malang Tahun 2017 – 2021 yang menunjukkan pangsa pengeluaran makanan lebih kecil dibanding dengan pangsa pengeluaran non makanan.



Gambar 14. Peta SKPG Aspek Akses Pangan Kota Malang Tahun 2022

Gambar 14 menunjukkan bahwa hasil analisis SKPG Kota Malang Tahun 2022 untuk semua kecamatan dalam kategori aman. Analisis aspek akses pangan ini hanya menggunakan indikator rasio rata-rata harga bulan berjalan komoditas tunggal, yaitu beras dibandingkan dengan rata-rata harga 3 (tiga) bulan terakhir. Sedangkan, permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan umumnya bersifat kronis yang meliputi aspek fisik, ekonomi, dan sosial. Aspek fisik berupa infrastruktur jalan dan pasar, aspek ekonomi berupa daya beli yang masih rendah karena kemiskinan dan pengangguran, dan aspek sosial berupa tingkat pendidikan yang rendah. Untuk masalah dan tantangan fisik utama yang dihadapi dalam perbaikan akses pangan masyarakat antara lain adalah masih terjadinya kesenjangan, ketersediaan, dan distribusi pangan setempat dengan standar

kecukupan ketersediaan. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 10 bahwa ketersediaan energi di Kota Malang periode tahun 2017 – 2021 masih di bawah standar kecukupan ketersediaan energi rekomendasi WNPX XI Tahun 2018, yaitu 2.400 Kalori/kapita/hari. Demikian juga ketersediaan energi tahun 2022 hanya mencapai 2.193 Kalori/kapita/hari atau memenuhi 91,4% standar kecukupan ketersediaan (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2022). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang harus tetap mewaspadaai aspek ekonomi berupa daya beli mengingat daya beli masyarakat akan mempengaruhi pemenuhan konsumsi energi dan protein masyarakat, yang belum tersedia data secara kontinu dan berkelanjutan.



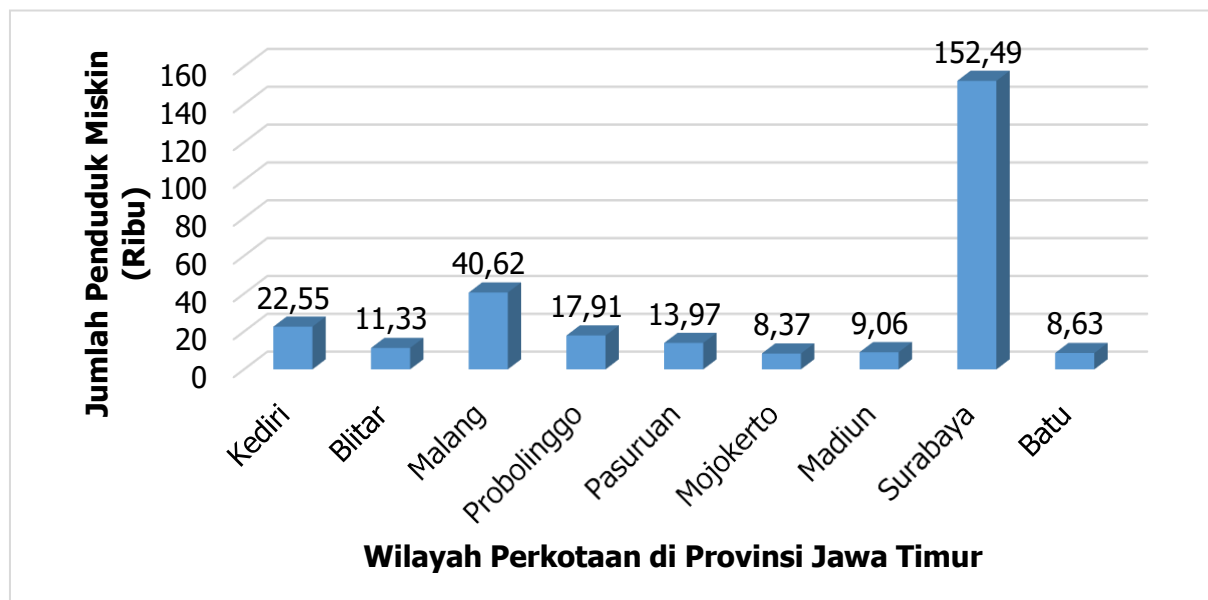
Sumber: BPS Kota Malang, 2022

Gambar 15. Pangsa Pengeluaran Makanan (%) dan Pengeluaran Non Makanan (%) Kota Malang Tahun 2017 – 2021

Berkaitan dengan pemenuhan ketersediaan energi dan protein Kota Malang Tahun 2022 yang masih di bawah standar kecukupan ketersediaan rekomendasi WNPX XI Tahun 2018, juga ditunjukkan dengan tingginya jumlah penduduk pra sejahtera Kota Malang yang mencapai 207.988 jiwa atau 24,62% dari jumlah penduduk Kota Malang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 21/HUK/2022 Tanggal 10 Februari 2022 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTPS). Dimana Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "Kebutuhan Dasar Keluarga" (Basic Needs), antara lain frekuensi konsumsi makan anggota keluarga kurang dari 2 (dua) kali sehari atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa akses pangan Keluarga Pra Sejahtera dalam kondisi waspada hingga rawan.

Analisis SKPG Kota Malang Tahun 2022 indikator akses pangan pada aspek ekonomi berupa daya beli yang rendah karena kemiskinan dan pengangguran, dapat ditunjukkan masih ditemukan jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat pada tahun 2017 – 2021 dan menempati urutan ke-2 tertinggi pada wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya pada Tahun 2021 (BPS Kota Malang, 2022), sebagaimana disajikan pada Gambar 16. Masalah dan tantangan ekonomi karena masih rendahnya pendapatan masyarakat berakibat pada daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan menjadi menurun. Masalah ini antara lain juga disebabkan oleh persoalan pengangguran serta kondisi ekonomi wilayah yang masih belum baik.

Rendahnya daya beli ini antara lain menyebabkan tingkat konsumsi pangan masyarakat masih di bawah yang direkomendasikan untuk mendukung kehidupan yang sehat dan aktif. Tantangan ekonomi lainnya yang menjadi hambatan dalam peningkatan aksesibilitas pangan adalah rendahnya sumberdaya yang tersedia di wilayah untuk mendorong terciptanya dampak pengganda ekonomi yang dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan dan mata pencaharian. Peningkatan aksesibilitas pangan Kota Malang dapat dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas pangan beragam untuk memenuhi konsumsi energi minimal 2.100 Kalori/kapita/hari terutama bagi rumah tangga miskin dan mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang bermutu dan aman untuk memenuhi target skor PPH pada tahun 2024 sebesar 95,2.



Sumber: BPS Kota Malang, 2022

Gambar 16. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) menurut Wilayah Perkotaan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

3. Aspek Pemanfaatan Pangan

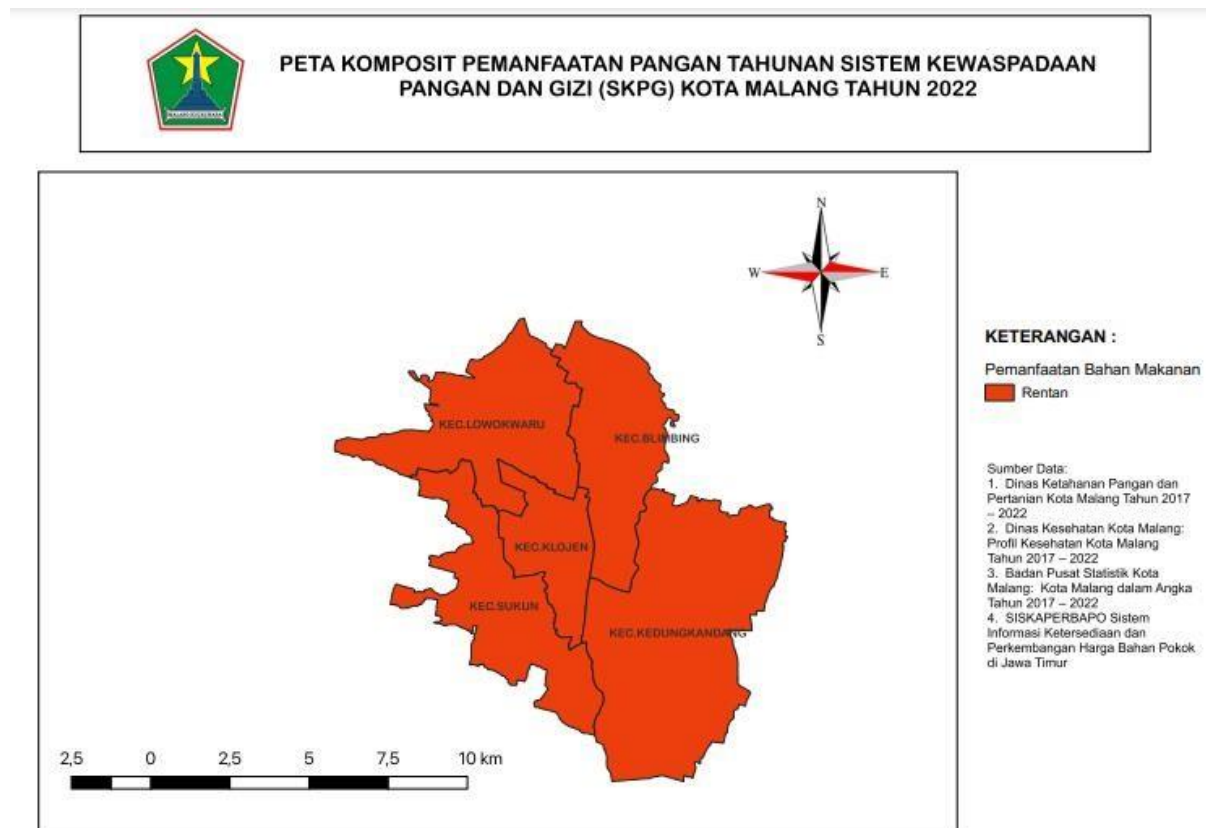
Kecukupan konsumsi dipengaruhi oleh ketahanan pangan di tingkat keluarga dan pola asuh, sementara itu penyakit infeksi dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan seperti imunisasi, kualitas lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara itu, faktor yang mendasari faktor langsung dipengaruhi oleh akar masalah, adalah pendidikan, kelembagaan, politik dan ideologi, kebijakan ekonomi, sumber daya lingkungan, teknologi, dan penduduk. Sedangkan untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak berfungsi, maka pemerintah perlu melakukan tindakan intervensi.

Upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dapat berupa jaminan sosial/bantuan/subsidi, kebijakan harga pangan, kebijakan impor/ekspor, kebijakan cadangan pangan pemerintah. Untuk meningkatkan keterjangkauan perlu dilakukan intervensi dalam aspek distribusi berupa penyaluran pangan bersubsidi, penyaluran pangan untuk keadaan darurat dan operasi pasar untuk pengendalian harga pangan. Sementara itu, dalam aspek pemanfaatan pangan berupa konsumsi energi dan zat gizi dapat dilakukan melalui pemberian makanan tambahan untuk kelompok rawan pangan/gizi buruk dan pemberian bantuan tunai untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan.

Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menggambarkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan yang cukup dan aman. Mengatasi kemiskinan artinya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang aman, dan bergizi. Namun selain itu, juga diperlukan adanya pola asuh dan pemberian makan yang tepat yang ditentukan oleh pengetahuan orang tua, terutama ibu. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah akses terhadap layanan kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui program jaminan kesehatan sosial, sanitasi yang baik yang dapat menurunkan kejadian infeksi, dan lingkungan yang aman. Apabila hal ini berjalan dengan baik dampaknya sensitif terhadap perbaikan gizi.

Hasil analisis SKPG Kota Malang Tahun 2022 menunjukkan bahwa indikator SKPG pada aspek pemanfaatan pangan, peta situasi pangan dan gizi berwarna merah atau dalam situasi rentan, sebagaimana disajikan pada Gambar 17. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari aspek akses pangan, Kota Malang terindikasi tidak tahan pangan. Gambar 17 menunjukkan bahwa rasio jumlah balita berat badan naik (N) dibanding dengan jumlah balita ditimbang terkoreksi (D') kurang dari 80% dan rasio jumlah balita yang tidak naik berat badan dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T) dibanding dengan jumlah balita ditimbang terkoreksi (D') lebih besar dari 20% menyebabkan peta aspek pemanfaatan pangan Kota Malang tahun 2022

dalam kategori rentan. Hal ini secara langsung berhubungan dengan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan. Konsumsi pangan yang beragam sangat penting oleh karena tubuh manusia memerlukan beragam jenis zat gizi yang bersumber dari berbagai jenis makanan dan minuman. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat yang lebih luas baik wilayah, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Gambaran kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Namun, ketersediaan data konsumsi pangan penduduk Kota Malang belum tersedia, sehingga belum dapat dianalisis lebih jauh keterkaitannya dengan aspek pemanfaatan pangan dalam kategori rentan pada tahun 2022 ini.



Gambar 17. Peta SKPG Aspek Pemanfaatan Pangan Kota Malang Tahun 2022

Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan. Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lain yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan

sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Analisis data dan informasi secara berkesinambungan tentang Situasi Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan di Kota Malang – Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, melalui analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) pada aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, dan aspek pemanfaatan pangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek ketersediaan pangan menunjukkan Indeks Ketersediaan Pangan (IKP) dalam kategori waspada. Namun demikian, berdasarkan wilayah kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru dalam kategori aman. Terjadi peningkatan dibandingkan dengan analisis SKPG pada aspek ketersediaan pangan tahun 2021, dimana semua kecamatan di Kota Malang dalam kategori waspada.
2. Aspek akses pangan menunjukkan Indeks Akses Pangan (IAP) dalam kategori aman. Namun demikian, tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan masalah gizi sebagai akibat kuantitas dan kualitas berupa keragaman konsumsi pangan yang tidak memadai atau tidak memenuhi standar kecukupan konsumsi yang dianjurkan dan aspek pemanfaatan pangan Kota Malang Tahun 2022 dalam keadaan rentan.
3. Aspek pemanfaatan pangan menunjukkan hasil analisis SKPG Kota Malang Tahun 2022 pada skor komposit aspek pemanfaatan pangan dalam keadaan rentan. Terjadi penurunan dibandingkan dengan hasil analisis SKPG Kota Malang Tahun 2021 yang menunjukkan bahwa peta situasi pangan dan gizi berwarna hijau atau dalam situasi aman.
4. Tantangan dalam aspek pemanfaatan pangan di Kota Malang Tahun 2022 adalah ketersediaan pangan sebagian besar masih belum memenuhi kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan sesuai standar rekomendasi WNPG XI Tahun 2018, yaitu sebesar 2.193 Kalori/kapita/hari, dimana ketersediaan pangan karbohidrat masih mendominasi sebagai sumber energi, konsumsi protein, sayuran dan buah-buahan masih belum mencukupi, serta ketersediaan kacang-kacangan sebagai pangan sumber protein nabati yang ditunjukkan dengan skor PPH sebesar 37 (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2022).

B. Saran/Rekomendasi

1. Peningkatan produksi sebagian komoditas pangan, khususnya beras, agar dapat mengimbangi kenaikan konsumsi dalam pemenuhan kecukupan konsumsi energi sesuai standar rekomendasi WNPG XI Tahun 2018. Demikian juga, masih tingginya ketergantungan terhadap impor beras dapat mengancam ketahanan pangan selama krisis akibat Pandemi COVID-19.
2. Menetapkan target ketersediaan pangan utama dan strategis khususnya beras, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah hingga tahun 2024 berupa energi 2.400 Kalori/kapita/hari dan protein 63 gram/kapita/hari untuk memenuhi standar kecukupan konsumsi pangan penduduk berupa energi 2.100 Kalori/kapita/hari dan protein 57 gram/kapita/hari, dengan skor PPH ketersediaan dan konsumsi masing-masing memenuhi 95,2.
3. Melakukan survei konsumsi pangan penduduk secara kontinu dan berkelanjutan sehingga dapat menetapkan target Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) 5,7% dan Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES) 3,1% pada tahun 2024.
4. Aspek Ketersediaan Pangan. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui:
 - a. Peningkatan produksi pangan yang beragam;
 - b. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);
 - c. Pengelolaan cadangan pangan hingga tingkat masyarakat;
 - d. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss); dan
 - e. Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi.
5. Aspek Akses Pangan. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), melalui:
 - a. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
 - b. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan;
 - c. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;
 - d. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;
 - e. Penyediaan dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat;
 - f. Penumbuhan Kemandirian Pangan untuk masyarakat di wilayah kecamatan rentan rawan pangan dan terdampak bencana; dan
 - g. Pengembangan Sistem Logistik Pangan.

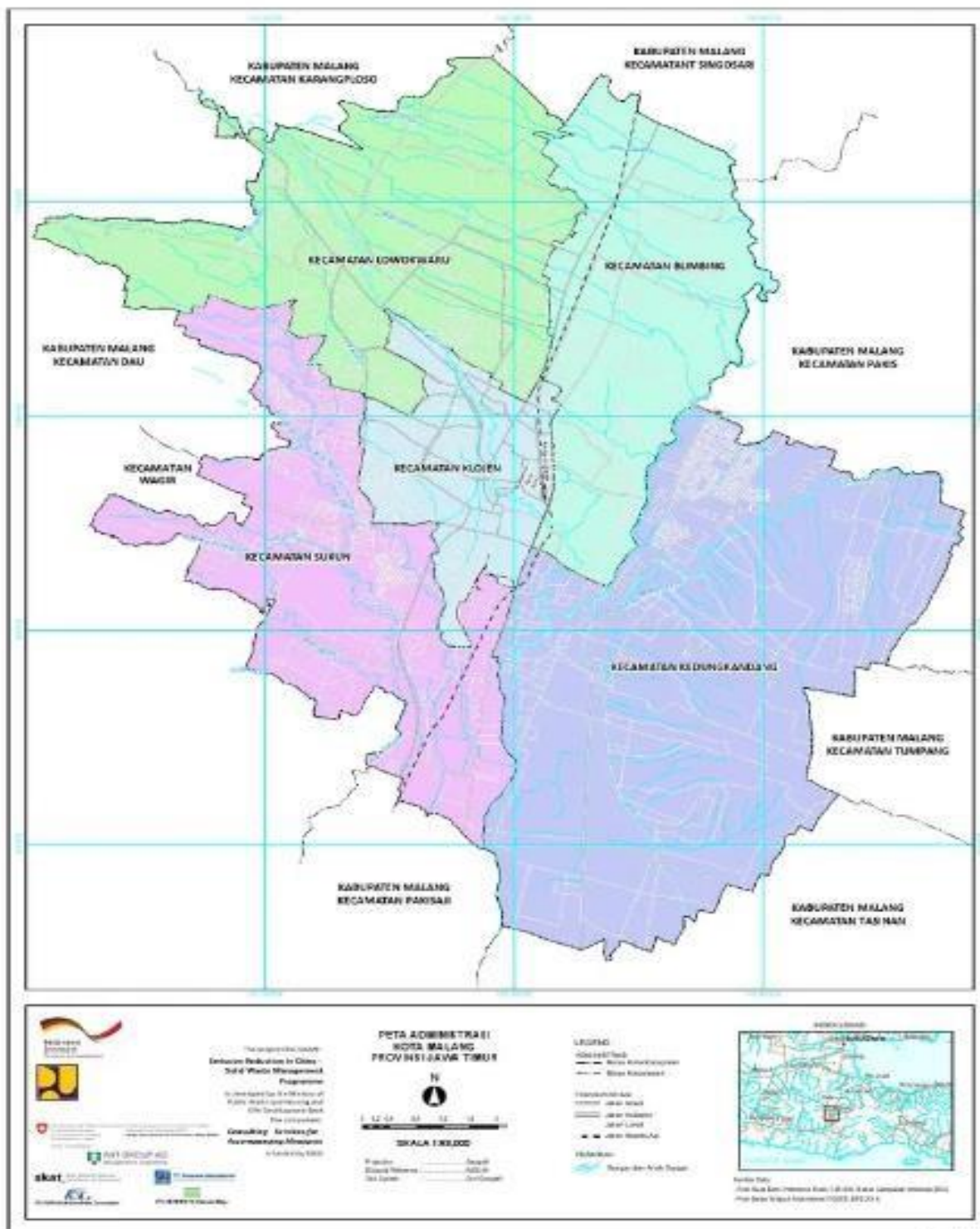
6. Aspek Pemanfaatan Pangan. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial) melalui:
 - a. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan pemantauan status gizi;
 - b. Pemutakhiran Status Ketahanan dan Kerentanan Pangan setiap tahun;
 - c. Edukasi Pola Konsumsi Pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
 - d. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu Pangan;
 - e. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan Pangan;
 - f. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis Pangan lokal;
 - g. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - h. Pengendalian pemborosan pangan (food waste);
 - i. Fortifikasi pada pangan tertentu; dan
 - j. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.
7. Menurunkan masalah undernutritions yaitu pendek (stunting), kurus (wasting), kekurangan zat gizi mikro, serta mengendalikan penyakit tidak menular

DAFTAR PUSTAKA

- Atasa, D. dan Nugroho, T.W. 2021. Analisis Ketersediaan Pangan Kota Malang. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. Juli 2021, 7(2): 1185 – 1194.
- Atasa, D., Laily D.W., dan Wijayanti, P.D. 2022. Dinamika Ketersediaan Pangan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Kota Malang. *Jurnal Agroteknologi dan Agribisnis*. AGRINIKA-2022. 6(1): 10 – 22.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2022. Kota Malang dalam Angka 2022. Malang.
- Dinas Kesehatan Kota Malang. 2020. Profil Kesehatan Kota Malang Tahun 2019. Malang.
- Dinas Kesehatan Kota Malang. 2021. Profil Kesehatan Kota Malang Tahun 2020. Malang.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2021. Profil Kesehatan Tahun 2021. Surabaya.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. 2021. Laporan Akhir Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kota Malang Tahun 2022. Malang.
- Kementerian Pertanian RI. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian RI. Jakarta.
- Kementerian Pertanian RI. 2014. Pedoman Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 Tanggal 27 Juli 2010. Jakarta.
- Kementerian Pertanian RI. 2019. Panduan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian RI. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021. 27 Desember 2021. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten/Kota Tahun 2021. 27 Desember 2021. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2021. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021 – 2024. Jakarta.
- Khomsan, A. 2018. Lingkaran Setan Generasi Stunting. *Media Indonesia*. 25 Agustus 2018.
- Pujoharso, C. 2013. Aplikasi Teori Konsumsi Keynes terhadap Pola Konsumsi Makan Masyarakat Indonesia. *Artikel Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Wilayah Kota Malang



Lampiran 1.a. Form A.1.1. Aspek Ketersediaan Pangan Bulanan												
Kota : Malang												
Bulan : Januari - Desember 2022												
Tahun : 2022												
No.	Kecamatan	Luas Tanam	Rata-rata Luas Tanam Bulan Bersangkutan 5 Tahun Terakhir	Luas Puso	Rata-rata Luas Puso Bulan Bersangkutan 5 Tahun Terakhir	Luas Tanam Bulan Berjalan Dibandingkan Rata-rata Luas Tanam Bulan Bersangkutan 5 Tahun Terakhir		Luas Puso Bulan Berjalan Dibandingkan Rata-rata Luas Puso Bulan Bersangkutan 5 Tahun Terakhir		Komposit		
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(%)	Bobot	(%)	Bobot			
1	2	3	4	5	6	7 = $\{(3/4) \times 100\} - 100$		8	9 = $\{(6/7) \times 100\} - 100$		10	11
1.	Kedungkandang	868	847	0	0	2,5	1	0	0	1	Aman	
2.	Sukun	423	529	0	0	-20,1	3	0	0	1	Waspada	
3.	Klojen	0	0	0	0	0	2	0	0	1	Waspada	
4.	Blimbing	196	211	0	0	-7,0	3	0	0	1	Waspada	
5.	Lowokwaru	675	637	0	0	5,9	1	0	0	1	Aman	
Jumlah		2.162	2.224	0	0	-2,8	2	0	0	1	Waspada	
Keterangan:												
Kolom 7			Kolom 9			Kolom 11						
r ≥ 5 1 = Aman			r < -5 1 = Aman			Total Bobot 2 = Warna Hijau						
-5 ≤ r < 5 2 = Waspada			5 ≤ r < -5 2 = Waspada			Total Bobot 3 - 4 dan Tidak Ada Bobot 3 = Warna Kuning						
r < -5 3 = Rawan			r < 5 3 = Rawan			Total Bobot 4 - 6 dan Ada Bobot 3 = Warna Merah						
Malang, 9 Desember 2022												
Sekretariat Pokja Petugas												
.....												

Lampiran 2. Form A.2. Aspek Akses Pangan Bulanan					
Kota	: Malang				
Kecamatan	:				
Bulan	:				
Tahun	: 2022				
No.	Komoditas	Harga Rata-rata Bulan Berjalan di Tingkat Konsumen (Rp/Kg)	Harga Rata-rata 3 Bulan Terakhir (Rp/Kg)	Harga Rata-rata Bulan Berjalan Dibandingkan Harga Rata-rata 3 Bulan Terakhir (%)	Bobot
1	2	3	4	$5 = \{(3/4) \times 100\} - 100$	6
1.	Beras				
2.	Jagung				
3.	Ubi Kayu				
4.	Ubi Jalar				
5.	Gula				
6.	Minyak Goreng				
7.	Daging				
8.	Telur				
Keterangan:					
Kolom 6				Malang,..... 2022	
Komoditas Beras		Komoditas Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Gula, Minyak Goreng, Daging, dan Telur			
	Persentase	Bobot	Persentase	Bobot	Sekretariat Pokja
	$r < 5$	1 = Aman	$r < 5$	1 = Aman	Petugas
	$5 \leq r \leq 20$	2 = Waspada	$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada	
	$r > 20$	3 = Rawan	$r > 15$	3 = Rawan	
.....					

BERAS

No.	Komoditas	Harga Rata-rata Bulan Berjalan (November 2022) di Tingkat Konsumen (Rp/Kg)	Harga Rata-rata 3 Bulan Terakhir (Rp/Kg)	Harga Rata-rata Bulan Berjalan Dibandingkan Harga Rata-rata 3 Bulan Terakhir (%)	Bobot
1	2	3	4	$5 = \{(3/4) \times 100\} - 100$	6
1.	Kedungkandang	11.000	11.033	-0,3	1
2.	Sukun	11.000	11.033	-0,3	1
3.	Klojen	11.500	11.667	-1,43	1
4.	Blimbing	11.000	11.033	-0,3	1
5.	Lowokwaru	11.000	11.000	0	1
Kota Malang		11.000	11.155	-1,39	1

JAGUNG

No.	Komoditas	Harga Rata-rata Bulan Berjalan (November 2022) di Tingkat Konsumen (Rp/Kg)	Harga Rata-rata 3 Bulan Terakhir (Rp/Kg)	Harga Rata-rata Bulan Berjalan Dibandingkan Harga Rata-rata 3 Bulan Terakhir (%)	Bobot
1	2	3	4	$5 = \{(3/4) \times 100\} - 100$	6
1.	Kedungkandang	8.000	8.667	-7,70	1
2.	Sukun	8.000	8.667	-7,70	1
3.	Klojen	8.000	8.000	0	1
4.	Blimbing	8.000	8.000	0	1
5.	Lowokwaru	9.000	8.667	3,84	1
Kota Malang		8.416	8.433	-0,20	1

UBI KAYU

No.	Komoditas	Harga Rata-rata Bulan Berjalan (November 2022) di Tingkat Konsumen (Rp/Kg)	Harga Rata-rata 3 Bulan Terakhir (Rp/Kg)	Harga Rata-rata Bulan Berjalan Dibandingkan Harga Rata-rata 3 Bulan Terakhir (%)	Bobot
1	2	3	4	5 = $\{(3/4) \times 100\} - 100$	6
1.	Kedungkandang	6.000	7.667	-21,74	1
2.	Sukun	6.000	7.667	-21,74	1
3.	Klojen	5.000	5.000	0	1
4.	Blimbing	5.000	5.000	0	1
5.	Lowokwaru	6.000	6.000	0	1
Kota Malang		5.833	5.867	-0,58	1

Lampiran 3. Form A.3. Aspek Pemanfaatan Pangan												
Kota : Malang												
Bulan : OKTOBER												
Tahun : 2022												
No.	Kecamatan	Jumlah Balita	Jumlah Balita Ditimbang (D)	Jumlah Balita BB Naik (N)	Jumlah Balita BGM	Balita yang Tidak Naik BB dalam 2 Kali Penimbangan Berturut-turut (2T)	Pencapaian (%)			Stunting (TB/U)	Wasting (BB/TB)	Underweight (BB/U)
							N/D	BGM/D	2T/D			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Kedungkandang	14237	9058	5425	89	2468	59,89	0,98	27,25	796	558	779
2.	Sukun	13679	9591	5731	73	3588	59,75	0,76	37,41	537	583	792
3.	Klojen	6986	3127	1446	42	1531	46,24	1,34	48,96	368	213	333
4.	Blimbing	12388	7338	3793	102	3804	51,69	1,39	51,84	645	615	932
5.	Lowokwaru	11424	9495	2887	92	2739	30,41	0,97	28,85	716	337	619
Jumlah		58714	38609	19282	398	14130	49,94	1,03	36,60	3062	2306	3455
Keterangan:												
Kolom 8			Kolom 9			Kolom 10						
r > 90 1 = Aman			r < 5 1 = Aman			r < 10 1 = Aman						
80 ≤ r ≤ 90 2 = Waspada			5 ≤ r < 10 2 = Waspada			10 ≤ r < 20 2 = Waspada						
< 80 3 = Rentan			r > 10 3 = Rentan			r > 20 3 = Rentan						

Lampiran 8. Form B.3. Aspek Akses Pemanfaatan Pangan						
Kota : Malang						
Bulan : OKTOBER						
Tahun : 2022						
No.	Kecamatan	Jumlah Balita	Gizi Buruk (%)	Gizi Kurang (%)	KEP (%)	Bobot KEP
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7
1.	Kedungkandang	14237	0,07	4,85	4,92	1
2.	Sukun	13679	0,05	5,26	5,31	1
3.	Klojen	6986	0,03	4,17	4,19	1
4.	Blimbing	12388	0,02	6,70	6,72	1
5.	Lowokwaru	11424	0,08	4,61	4,69	1
Jumlah		58714	0,00	25,58	25,58	3
Keterangan:						
Kolom 8					Malang, 9 Desember 2022	
	Persentase	Bobot				
	r < 15	1 = Hijau			Sekretariat Pokja	
	15 ≤ r ≤ 20	2 = Kuning			Petugas	
	r > 20	3 = Merah				

Lampiran 9. Form B.4. Aspek Pemanfaatan Pangan									
Kota : Malang									
Bulan : OKTOBER									
Tahun : 2022									
No.	Kecamatan	Jumlah Balita 0 - 59 Bulan yang Ditimbang	Balita Gizi Kurang (BB/U)		Jumlah Balita 0 - 59 Bulan yang Diukur	Balita Pendek (TB/U)		Balita Kurus (BB/TB)	
			Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kedungkandang	14540	4,75	0,03	14540	796	5,47	553	3,80
2.	Sukun	13679	719	5,26	13679	537	3,93	569	4,16
3.	Klojen	5958	291	4,88	5958	368	6,18	211	3,54
4.	Blimbing	10967	830	7,57	10967	645	5,88	611	5,57
5.	Lowokwaru	9495	527	5,55	9495	716	7,54	327	3,44
Jumlah		54639	2371,74553	4,34	54639	3062	5,60	2271	4,16